



**KETIMPANGAN WILAYAH ANTAR KAWASAN BARAT
INDONESIA DAN KAWASAN TIMUR INDONESIA
TAHUN 2012-2016**

SKRIPSI

Oleh:

**Lailatul Latifah
NIM 1408101011**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**KETIMPANGAN WILAYAH ANTAR KAWASAN BARAT
INDONESIA DAN KAWASAN TIMUR INDONESIA
TAHUN 2012-2016**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1) dan memperoleh gelar sarjana Ekonomi

Oleh:

Lailatul Latifah
NIM 140810101011

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda Budiono dan Ibunda Khayumi yang tercinta, senantiasa tulus memberikan doa dalam setiap perjalanan ananda saat menempuh pendidikan mulai TK hingga Perguruan Tinggi, memberikan kasih dan sayang yang tak terhingga sehingga ananda semangat untuk terus meraih cita-cita.
2. Kakakku Dewi Anita yang telah memberikan semangat, kasih dan sayang yang tulus kepada ananda untuk meraih keberhasilan dan kesuksesan.
3. Guru-guruku yang terhormat mulai dari Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi, yang telah memberikan ilmu dan ketulusan hati untuk membimbing demi kesuksesan ananda.
4. Almater tercinta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
5. Teman-temanku tersayang, yang telah memberikan semangat dan inspirasi.

MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Terjemahan QS. Alam Nasyroh Ayat 5)

“Sukses bukanlah kunci kebahagiaan. Kebahagiaan adalah kunci untuk sukses.

Jika Anda mencintai apa yang Anda kerjakan, Anda akan sukses”

(Albert Schweitzer)

“Jangan percaya keterbatasan, tapi besarkan harapan. Jangan terlarut dalam

keraguan, tapi ciptakanlah kemauan. Jangan berserah dengan keadaan, tapi

bangkitlah dengan keyakinan. Yakin saya pasti bisa!”

(Merry Riana)

PERNYATAAN

Penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lailatul Latifah

NIM : 140810101011

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Ketimpangan Wilayah antar Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia Tahun 2012-2016” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukanlah hasil karya plagiarisme. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isi dari skripsi ini berdasarkan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun, serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata pernyataan ini di kemudian hari tidak benar.

Jember, 15 Maret 2018

Lailatul Latifah
140810101011

SKRIPSI

**KETIMPANGAN WILAYAH ANTAR KAWASAN BARAT
INDONESIA DAN KAWASAN TIMUR INDONESIA
TAHUN 2012-2016**

Oleh

Lailatul Latifah

NIM 140810101011

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Dr. Duwi Yunitasari, S.E., M.E.

Dosen Pembimbing II : Fajar Wahyu Prianto, S.E., M.E.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Ketimpangan Wilayah antar Kawasan Barat Indonesia dan
Kawasan Timur Indonesia Tahun 2012-2016

Nama Mahasiswa : Lailatul Latifah

NIM : 140810101011

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Konsentrasi : Ekonomi Regional

Tanggal Persetujuan: 15 Maret 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Duwi Yunitasari, S.E., M.E.
NIP. 197806162003122001

Fajar Wahyu Prianto, S.E., M.E.
NIP. 198103302005011003

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dr. Sebastiana Viphindrartin, M.Kes.
NIP. 196411081989022001

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

**KETIMPANGAN WILAYAH ANTAR KAWASAN BARAT INDONESIA
DAN KAWASAN TIMUR INDONESIA TAHUN 2012-2016**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Lailatul Latifah
NIM : 140810101011
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

20 April 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Drs. Badjuri, M.E. (.....)
NIP. 195312251984031002
2. Sekretaris : Dr. Herman Cahyo Diartho, S.E, M.P. (.....)
NIP. 197207131999031001
3. Anggota : Dr. Riniati, M.P. (.....)
NIP. 196004301986032001

Mengetahui/Menyetujui,
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan

Pas Foto

4 x 6

Dr. Muhammad Miqdad, S.E.,M.M., Ak., CA
NIP. 197107271995121001

Ketimpangan Wilayah antar Kawasan Barat Indonesia dan
Kawasan Timur Indonesia Tahun 2012-2016

Lailatul Latifah

*Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Jember*

ABSTRAK

Pembangunan nasional memiliki tujuan untuk menciptakan pembangunan yang merata dan berkeadilan di seluruh Indonesia. Akan tetapi kenyataan yang terjadi bahwa sampai saat ini, masih terjadi ketimpangan antarwilayah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ketimpangan wilayah antar Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia tahun 2012-2016, menganalisis secara parsial pengaruh tenaga kerja, penanaman modal, teknologi informasi dan komunikasi, dan aglomerasi terhadap ketimpangan wilayah di Kawasan Barat Indonesia tahun 2012-2016, dan menganalisis secara parsial pengaruh tenaga kerja, penanaman modal, teknologi informasi dan komunikasi, dan aglomerasi terhadap ketimpangan wilayah di Kawasan Timur Indonesia tahun 2012-2016. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berbentuk data panel yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Metode analisis yang digunakan yaitu indeks Williamson, indeks Theil, dan analisis regresi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa masih terdapat ketimpangan wilayah antar Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia selama tahun 2012-2016, yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata indeks Theil dan indeks Williamson sebesar 0,3367 dan 0,6553 untuk Kawasan Barat Indonesia dan untuk Kawasan Timur Indonesia sebesar 0,4075 dan 0,8467. Di Kawasan Barat Indonesia, tenaga kerja dan aglomerasi mempunyai pengaruh terhadap ketimpangan wilayah, sedangkan penanaman modal dan teknologi informasi dan komunikasi tidak mempunyai pengaruh terhadap ketimpangan wilayah. Di Kawasan Timur Indonesia, penanaman modal dan aglomerasi mempunyai pengaruh terhadap ketimpangan wilayah, sedangkan tenaga kerja dan teknologi informasi dan komunikasi tidak mempunyai pengaruh terhadap ketimpangan wilayah.

Kata Kunci: Kawasan Barat Indonesia, Kawasan Timur Indonesia, ketimpangan wilayah, tenaga kerja, penanaman modal, teknologi informasi dan komunikasi, aglomerasi.

*Regional Disparities between Western Region of Indonesia and
Eastern Region of Indonesia in 2012-2016*

Lailatul Latifah

*Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics and
Business, University of Jember*

ABSTRACT

National development has main goals to create equitable development of all Indonesian people. But in reality, until now there are still happened regional disparities of inter-regional areas in Indonesia. This research goals are to know the rate of regional disparities between Western Region of Indonesia and Eastern Region of Indonesia in 2012-2016, partially analyze the effect of labor, investment, information and communication technology, and agglomeration on the regional disparities in Western Region of Indonesia in 2012-2016, and partially analyze the effect of labor, investment, information and communication technology, and agglomeration on the regional disparities in Eastern Region of Indonesia in 2012-2016. This research using secondary data in the form of panel data from Badan Pusat Statistik (BPS). The analysis method used is Williamson index, Theil index, and regression analysis.

This research concludes that there are still happened regional disparities between Western Region of Indonesia and Eastern Region of Indonesia during 2012-2016, which is indicated by the average value of Theil index and Williamson index of 0,3367 and 0,6553 for the Western Region of Indonesia and for the Eastern Region of Indonesia of 0,4075 and 0,8467. In Western Region of Indonesia, labour and agglomeration has effect on the regional disparities, while investment and information and communication technology hasn't effect on the regional disparities. In Eastern Region of Indonesia, investment and agglomeration has effect on the regional disparities, while labor and information and communication technology hasn't effect on the regional disparities.

Keywords: *Western Region of Indonesia, Eastern Region of Indonesia, regional disparities, labor, investment, information and communication technology, agglomeration.*

RINGKASAN

Ketimpangan Wilayah antar Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia Tahun 2012-2016; Lailatul Latifah, 140810101011; 2018; 91 halaman; Program Studi Ekonomi Pembangunan, Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Ketimpangan wilayah merupakan masalah dan tantangan pembangunan di sebagian besar negara. Isu utama pembangunan wilayah saat ini adalah masih besarnya kesenjangan antarwilayah, khususnya kesenjangan pembangunan antar Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025, Kawasan Barat Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, dan Bali, sedangkan Kawasan Timur Indonesia meliputi Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua.

Penelitian Rosmeli dan Nurhayani (2014) dan Ginting (2014) menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia, yang ditunjukkan dengan nilai indeks Williamson dari tahun 2002-2010 sebesar 0,83 untuk Kawasan Barat Indonesia dan 0,45 untuk Kawasan Timur Indonesia (Rosmeli dan Nurhayani, 2014). Tidak heran jika kesenjangan antar Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia cenderung masih tinggi. Hal ini dikarenakan sebagian besar pusat perekonomian berada di kawasan barat, sebagian besar penduduk bermukim di kawasan barat, kondisi infrastruktur yang lebih baik di kawasan barat dibandingkan di kawasan timur, dan sebagainya. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah apakah kesenjangan antar Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia saat ini cenderung menurun ataukah justru semakin lebar, dan menganalisis pengaruh tenaga kerja, penanaman modal, teknologi informasi dan komunikasi, aglomerasi terhadap ketimpangan wilayah, baik di Kawasan Barat Indonesia maupun di Kawasan Timur Indonesia.

Secara teoritis, permasalahan ketimpangan pembangunan antarwilayah dimunculkan dalam Teori Neo-klasik. Dalam teori tersebut dimunculkan sebuah prediksi tentang hubungan antara skala perekonomian dengan derajat ketimpangan. Hipotesa ini kemudian lazim dikenal sebagai Hipotesa Neo-Klasik (Sjafrizal, 2008:105). Menurut Teori Kumulatif Kausatif Myrdal bahwa ketimpangan regional disebabkan karena kuatnya *backwash effect* dan lemahnya *spread effect* (Jhingan, 2012:212). Seperti Myrdal, dalam hubungan dengan penyebaran dampak pertumbuhan ke wilayah sekitarnya, Albert Hirschman memperkenalkan istilah *trickling down effect* atau dampak tetesan ke bawah (Adisasmita, 2005:65). Ketimpangan antarwilayah terjadi karena wilayah maju tidak mampu menyebarkan pertumbuhan ke wilayah sekitarnya.

Ketimpangan wilayah dalam penelitian ini diukur menggunakan indeks Williamson dan indeks Theil. Analisis regresi data panel dalam penelitian digunakan untuk mengkaji pengaruh tenaga kerja, penanaman modal, teknologi informasi dan komunikasi, aglomerasi terhadap ketimpangan wilayah, baik di Kawasan Barat Indonesia maupun di Kawasan Timur Indonesia. Selama tahun 2012-2016, masih terjadi ketimpangan di Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia yang dibuktikan dengan hasil perhitungan indeks Theil dan indeks Williamson, yaitu sebesar 0,3367 dan 0,6553 untuk Kawasan Barat Indonesia dan untuk Kawasan Timur Indonesia sebesar 0,4075 dan 0,8467. Ketimpangan di Kawasan Barat Indonesia cenderung mengalami peningkatan dan berada pada kategori ketimpangan sedang, sedangkan ketimpangan di Kawasan Timur Indonesia cenderung menurun dan berada pada kategori ketimpangan yang tinggi. Ketimpangan di Kawasan Barat Indonesia dikontribusi oleh ketimpangan antarprovinsi sebesar 50,91 persen dan ketimpangan intra provinsi sebesar 49,09 persen, sedangkan ketimpangan di Kawasan Timur Indonesia dikontribusi oleh ketimpangan antarprovinsi sebesar 54,45 persen dan ketimpangan intra provinsi sebesar 45,55 persen.

Berdasarkan hasil regresi, model yang tepat untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan wilayah di Kawasan Barat Indonesia adalah model *fixed effect*. Dari analisis tersebut diperoleh hasil bahwa tenaga kerja dan

aglomerasi mempunyai pengaruh terhadap ketimpangan wilayah di Kawasan Barat Indonesia, yang ditunjukkan dengan nilai t-statistik lebih besar dari t-tabel dan probabilitas t-statistik kurang dari taraf signifikansi ($\alpha=5\%$). Tenaga kerja dan aglomerasi mempunyai hubungan yang positif terhadap ketimpangan wilayah di Kawasan Barat Indonesia. Sementara itu, penanaman modal dan teknologi informasi dan komunikasi tidak mempunyai pengaruh terhadap ketimpangan wilayah di Kawasan Barat Indonesia.

Sementara itu, model yang tepat untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan wilayah di Kawasan Timur Indonesia adalah model *random effect*. Dari analisis tersebut diperoleh hasil bahwa penanaman modal dan aglomerasi mempunyai pengaruh terhadap ketimpangan wilayah di Kawasan Timur Indonesia, yang ditunjukkan dengan nilai t-statistik lebih besar dari t-tabel atau probabilitas t-statistik kurang dari taraf signifikansi ($\alpha=5\%$), sedangkan tenaga kerja dan teknologi informasi dan komunikasi tidak mempunyai pengaruh terhadap ketimpangan wilayah di Kawasan Timur Indonesia. Aglomerasi mempunyai hubungan yang positif terhadap ketimpangan wilayah di Kawasan Timur Indonesia, artinya konsentrasi ekonomi antardaerah yang cukup tinggi dapat mendorong meningkatnya ketimpangan. Sementara itu, penanaman modal mempunyai hubungan negatif dengan ketimpangan wilayah di Kawasan Timur Indonesia, artinya alokasi investasi yang masuk ke suatu daerah dapat berdampak pada pengurangan ketimpangan.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, berkat serta ridho-Nya dan sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Muhammad SAW atas petunjuk yang telah diberikan kepada umatnya mulai jaman jahiliyah hingga menuju jalan kebenaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Ketimpangan Wilayah antar Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia Tahun 2012-2016”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik motivasi, nasihat, dan kritik yang membangun. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Duwi Yunitasari, S.E., M.E. selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk belajar mengenai banyak hal dan selalu memberikan waktu luang dan kesediaan beliau untuk membimbing, memberikan arahan, kritik yang membangun bagi saya, saran yang memberikan manfaat, keikhlasan serta ketulusan yang tidak dapat dinilai oleh apapun dalam membantu menyelesaikan skripsi ini,
2. Bapak Fajar Wahyu Prianto, S.E., M.E. selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan dengan sabar dan tulus dalam menyelesaikan skripsi ini,
3. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M, Ak, CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember,
4. Ibu Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes selaku ketua jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan,
5. Bapak Dr. I Wayan Subagiarta, M.Si. selaku dosen pembimbing akademik yang senantiasa membimbing penulis selama masa studi,
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta staf karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember,

7. Ayahanda Budiono dan Ibunda Khayumi, terima kasih yang tak terhingga ananda ucapkan atas doa yang terus mengalir untuk ananda, dukungan, semangat, kasih dan sayang yang tulus, kerja keras, kesabaran dan pengorbanan yang selama ini tidak dapat dinilai oleh apapun,
8. Kakakku Dewi Anita yang selalu memberikan semangat dan kasih sayang yang tulus kepada penulis,
9. Teman-teman seperjuangan dalam mengerjakan skripsi Olvi Mifta A. J., Luky Ummul Q., Uswatun Khasanah, Chintia K. I., Firda Nisfia N., Kharisma Kurnia B., Siti Nurcahyani, Tika Maningarta, Fifi Irawati, Hafsa Dewi M., Tutik Dwi R., dan Novi Ariyani terima kasih atas dukungan dan semangat serta bantuan kalian dalam segala hal.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari atas kekurangan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan bagi penyempurnaan tugas akhir ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi penulisan karya tulis selanjutnya.

Jember, 15 Maret 2018

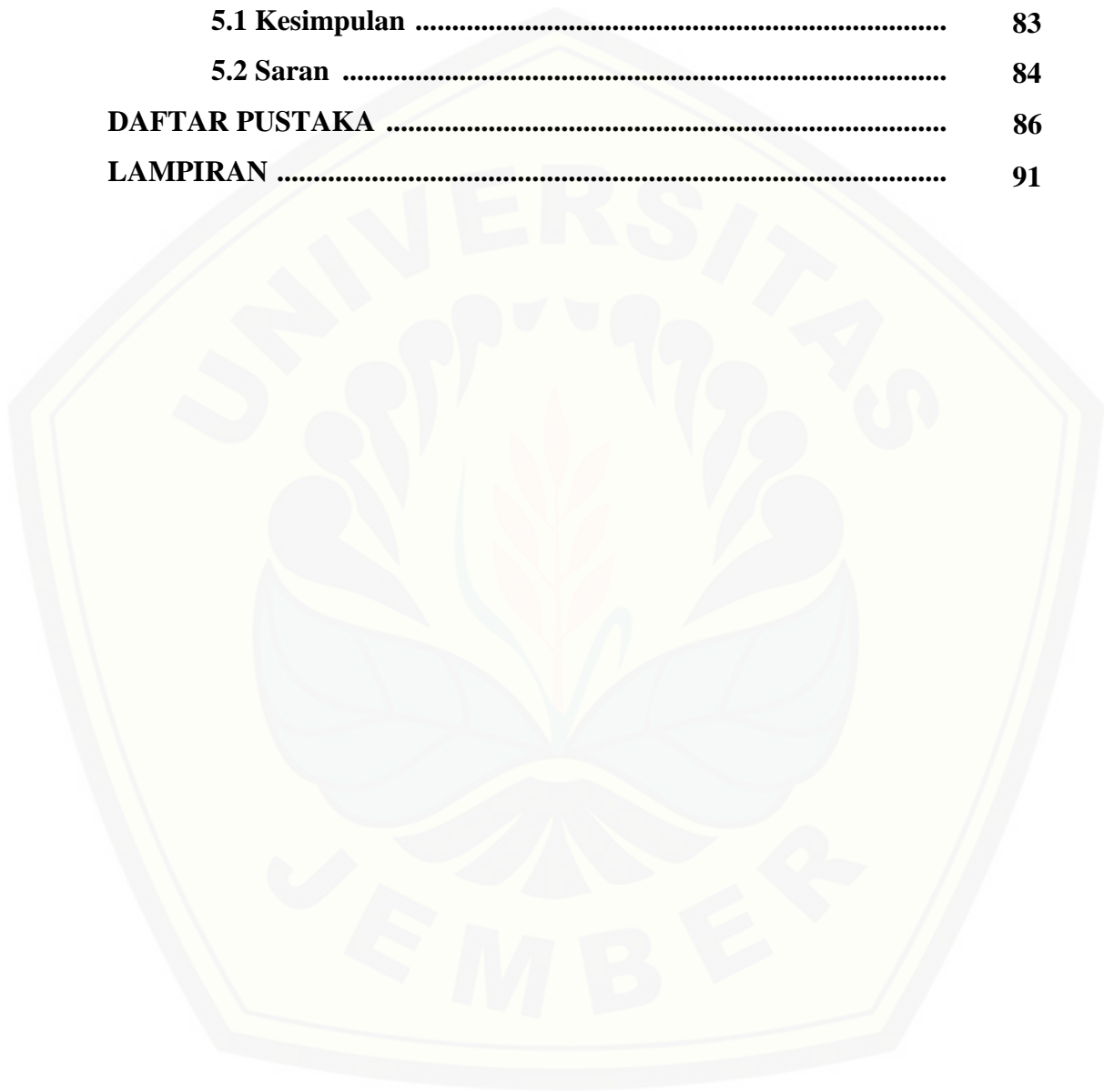
Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
RINGKASAN	xi
PRAKATA	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
DAFTAR SINGKATAN	xxii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Teori Pembangunan Wilayah	8
2.1.2 Ketimpangan Pembangunan Wilayah	17
2.1.3 Tenaga Kerja	19
2.1.4 Penanaman Modal	20

2.1.5 Teknologi Informasi dan Komunikasi	21
2.1.6 Aglomerasi	22
2.2 Penelitian Terdahulu	23
2.3 Kerangka Konseptual	33
2.4 Hipotesis Penelitian	36
BAB 3. METODE PENELITIAN	37
3.1 Rancangan Penelitian	37
3.1.1 Jenis Penelitian	37
3.1.2 Wilayah Penelitian	37
3.1.3 Unit Analisis	38
3.1.4 Jenis dan Sumber Data	38
3.2 Metode Analisis Data	38
3.2.1 Analisis Ketimpangan Wilayah	38
3.2.2 Analisis Regresi Data Panel	40
3.3 Definisi Operasional Variabel	45
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	47
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	47
4.1.1 Kondisi Penduduk dan Tenaga Kerja	47
4.1.2 Kondisi Ekonomi	49
4.1.3 Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	53
4.2 Hasil Analisis Data	55
4.2.1 Analisis Ketimpangan Wilayah	55
4.2.2 Analisis Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Wilayah di Kawasan Barat Indonesia	57
4.2.3 Analisis Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Wilayah di Kawasan Timur Indonesia	63
4.3 Pembahasan	70
4.3.1 Ketimpangan Wilayah antar Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia	70
4.3.2 Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Wilayah	

di Kawasan Barat Indonesia	72
4.3.3 Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Wilayah di Kawasan Timur Indonesia	78
BAB 5. KESIMPULAN	83
5.1 Kesimpulan	83
5.2 Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	91



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Menurut Kawasan	3
Tabel 1.2 Perbandingan Tenaga Kerja dan PDRB	4
Tabel 2.1 Matrik Penelitian Terdahulu	29
Tabel 4.1 Perkembangan Penduduk Menurut Kawasan (jiwa)	47
Tabel 4.2 Perkembangan Tenaga Kerja yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha	49
Tabel 4.3 Perkembangan PDRB per Kapita Menurut Kawasan (Rupiah)	50
Tabel 4.4 Perkembangan PDRB dan <i>Share</i> Sektor Industri Pengolahan Menurut Kawasan	52
Tabel 4.5 Perkembangan Penanaman Modal Menurut Kawasan	53
Tabel 4.6 <i>Corellation Matrix</i> antarvariabel Bebas	60
Tabel 4.7 Hasil Uji <i>Glejser</i>	61
Tabel 4.8 Hasil Uji F	62
Tabel 4.9 Hasil Uji t	63
Tabel 4.10 <i>Corellation Matrix</i> antarvariabel Bebas	67
Tabel 4.11 Hasil Uji <i>Glejser</i>	68
Tabel 4.12 Hasil Uji F	69
Tabel 4.13 Hasil Uji t	69

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kurva Ketimpangan Regional	18
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual	35
Gambar 4.1 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kawasan	50
Gambar 4.2 Perkembangan IP-TIK Menurut Kawasan	54
Gambar 4.3 Indeks Williamson dan Indeks Theil Kawasan Barat Indonesia	56
Gambar 4.4 Indeks Williamson dan Indeks Theil Kawasan Timur Indonesia	57
Gambar 4.5 Uji Normalitas	60
Gambar 4.6 Uji Normalitas	67

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1.1 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Kawasan	92
Lampiran 1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kawasan	93
Lampiran 1.3 Perkembangan PDRB per Kapita Menurut Kawasan	94
Lampiran 1.4 Tenaga kerja yang Bekerja Menurut Kawasan	96
Lampiran 1.5 Persentase Tenaga Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	98
Lampiran 1.6 Realisasi Penanaman Modal Menurut Kawasan (Milyar Rupiah)	100
Lampiran 1.7 IP-TIK Menurut Kawasan	104
Lampiran 1.8 Indeks Balassa Menurut Kawasan	105
Lampiran 4.1 Indeks Williamson Menurut Kawasan	106
Lampiran 4.2 Indeks Williamson Menurut Provinsi	106
Lampiran 4.3 Indeks Theil Kawasan Barat Indonesia	108
Lampiran 4.4 Indeks Theil Kawasan Timur Indonesia	109
Lampiran 4.5 Data Penelitian Kawasan Barat Indonesia	110
Lampiran 4.6 Data Penelitian Kawasan Timur Indonesia	112
Lampiran 4.7 Hasil Uji <i>Likelihood</i> Kawasan Barat Indonesia	115
Lampiran 4.8 Hasil Uji <i>Hausman</i> Kawasan Barat Indonesia	116
Lampiran 4.9 Hasil Analisis Regresi Model Terpilih Kawasan Barat Indonesia	117
Lampiran 4.10 Hasil Uji <i>Likelihood</i> Kawasan Barat Indonesia	118
Lampiran 4.11 Hasil Uji <i>Hausman</i> Kawasan Barat Indonesia	119
Lampiran 4.12 Hasil Analisis Regresi Model Terpilih Kawasan Timur Indonesia	120

DAFTAR SINGKATAN

- Bappenas : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Bappeda : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- IP-TIK : Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi
- MP3EI : *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia
- OECD : *Organization for Economic Cooperation and Development*
- PDB : Produk Domestik Bruto
- PDRB : Produk Domestik Regional Bruto
- PMA : Penanaman Modal Asing
- PMDN : Penanaman Modal Dalam Negeri
- RPJPN : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
- TIK : Teknologi Informasi dan Komunikasi

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketimpangan wilayah merupakan tantangan pembangunan di sebagian besar negara. Pola ketimpangan antara negara satu dengan negara lainnya juga berbeda. Douglas C. North merupakan tokoh yang pertama kali membahas permasalahan ketimpangan pembangunan antarwilayah. North membuat hipotesa tentang hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pembangunan. Hipotesa ini kemudian lazim dikenal sebagai Hipotesa Neo-Klasik (Sjafrizal, 2008:105). Pada tahun 1960-an, Williamson melakukan penelitian tentang ketimpangan wilayah di beberapa negara maju dan negara berkembang untuk menguji kebenaran hipotesa tersebut. Williamson menunjukkan bahwa disparitas regional lebih besar di negara berkembang dan lebih rendah di negara maju. Di negara berkembang, disparitas regional meningkat pada tahap awal pembangunan, kemudian akan menurun pada tingkat pembangunan yang matang (*maturity*). Menurut Williamson, ketimpangan pembangunan yang menurun disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk pemerataan pertumbuhan wilayah dan kesetaraan pendapatan, penemuan sumber daya baru di wilayah kurang berkembang, dan sebagainya (Akai dan Sakata, 2005).

Menurut Myrdal, ketimpangan suatu daerah terjadi karena adanya konsentrasi ekonomi yang cukup tinggi di suatu wilayah sehingga membuat daerah belakangnya mengalami dampak kurang baik. Ketimpangan wilayah akan semakin parah jika sebagian daerah tumbuh dengan merugikan wilayah lain yang mengalami stagnasi. Myrdal mengatakan bahwa daerah terbelakang kurang mampu berkembang secepat daerah maju karena adanya *backwash effect* yang menyebabkan daerah terbelakang menghadapi banyak hambatan dalam mengembangkan ekonominya. Sementara itu, menurut teori ketergantungan (*dependency theory*) bahwa ketergantungan memberikan dampak negatif bagi negara pinggiran (pertanian). Adanya spesialisasi produksi memungkinkan terjadinya perdagangan internasional, dengan asumsi perdagangan diharapkan akan menguntungkan kedua belah pihak. Dengan kata lain, pembangunan yang paling

baik menurut teori ini adalah pembangunan yang meleburkan diri ke dalam kegiatan ekonomi, karena pada dasarnya negara saling bergantung satu sama lain dan akan lebih menguntungkan jika negara-negara saling mengisi kelemahan yang ada. Namun kenyataannya, justru tercipta kesenjangan (*gap*) besar di kedua negara tersebut. Negara yang berspesialisasi di bidang industri semakin kaya, sedangkan negara yang berspesialisasi di bidang pertanian semakin tertinggal.

Di Indonesia, ketimpangan pembangunan antarwilayah dapat diidentifikasi pada tiga konteks utama, yaitu Jawa dan luar Jawa, Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia, serta desa dan kota. Isu utama pembangunan wilayah nasional¹ saat ini adalah masih besarnya kesenjangan antarwilayah, khususnya kesenjangan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia. Hal tersebut ditegaskan pula dalam RPJPN 2005-2025 bahwa misi pembangunan nasional adalah mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan, salah satunya yaitu mengurangi kesenjangan Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025, Kawasan Barat Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, dan Bali, sedangkan Kawasan Timur Indonesia meliputi Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua.

Indikasi ketimpangan pembangunan antar Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia dapat dilihat dari perbedaan perkembangan ekonomi wilayah. Tabel 1.1 menunjukkan bahwa selama tahun 2012-2016 kontribusi PDRB Kawasan Barat Indonesia sangat dominan dan tidak pernah kurang dari 80 persen terhadap PDB, sedangkan kontribusi PDRB Kawasan Timur Indonesia terhadap PDB hanya sekitar 20 persen. Sementara itu, laju pertumbuhan ekonomi di Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia menunjukkan kecenderungan yang menurun. Meskipun demikian, laju pertumbuhan ekonomi di Kawasan Barat Indonesia lebih tinggi dibandingkan Kawasan Timur Indonesia.

¹Wilayah nasional adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk di dalam bumi berdasarkan peraturan perundang-undangan (PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional).

Tabel 1.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Menurut Kawasan

Tahun	PDRB (Milyar Rp)		Kontribusi PDRB terhadap PDB (%)		Pertumbuhan Ekonomi (%)	
	Kawasan Barat Indonesia	Kawasan Timur Indonesia	Kawasan Barat Indonesia	Kawasan Timur Indonesia	Kawasan Barat Indonesia	Kawasan Timur Indonesia
2012	6.281.318	1.454.467	81,20	18,80	6,21	5,95
2013	6.641.468	1.536.357	81,21	18,79	5,73	5,63
2014	6.995.085	1.608.543	81,30	18,70	5,32	4,70
2015	7.341.493	1.691.301	81,28	18,72	4,95	5,14
2016	7.727.273	1.771.301	81,35	18,65	5,25	4,73

Sumber: Lampiran 1.1, 1.2.

Selain itu, jika dilihat dari perkembangan PDRB per kapita, pada tahun 2012 PDRB per kapita Kawasan Barat Indonesia sebesar 13.881.003 Rupiah, sedangkan Kawasan Timur Indonesia sebesar 30.050.127 Rupiah. Pada tahun 2016, PDRB per kapita Kawasan Barat Indonesia meningkat menjadi 37.330.748 Rupiah, dan PDRB per kapita Kawasan Timur Indonesia juga meningkat sebesar 34.254.358 Rupiah (Lampiran 1.3). Dengan demikian, perbedaan PDRB dan PDRB per kapita yang mencolok antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia menandakan bahwa masih terjadi ketimpangan antarkawasan di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Myrdal yang mengatakan bahwa pembangunan ekonomi menghasilkan suatu proses sebab menyebabkan sirkuler yang membuat si kaya mendapat keuntungan semakin banyak, dan mereka yang tertinggal di belakang semakin terhambat sehingga dalam jangka panjang pendapatan per kapita antardaerah cenderung timpang (Jhingan, 2012:211-212).

Masalah ketimpangan yang harus ditelusuri adalah faktor-faktor apa yang menyebabkan ketimpangan tersebut. Rosmeli (2015) menunjukkan bahwa perbedaan tenaga kerja dapat menyebabkan ketimpangan pembangunan wilayah. Menurut teori Adam Smith, alokasi sumber daya manusia merupakan *necessary condition* bagi pertumbuhan ekonomi. Wilayah yang memiliki tenaga kerja yang lebih banyak, maka *output* yang dihasilkan wilayah tersebut akan lebih besar dibandingkan wilayah yang memiliki tenaga kerja yang lebih sedikit. Tabel 1.2 menunjukkan bahwa tenaga kerja di Indonesia cenderung terkonsentrasi di Kawasan Barat Indonesia, dan *output* yang dihasilkan juga berbeda antara Kawasan

Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia. Dengan demikian, perbedaan jumlah tenaga kerja dapat menyebabkan ketimpangan wilayah.

Tabel 1.2 Perbandingan Tenaga Kerja dan PDRB

Tahun	Kawasan Barat Indonesia		Kawasan Timur Indonesia	
	Tenaga Kerja (orang)	PDRB (Milyar Rp)	Tenaga Kerja (orang)	PDRB (Milyar Rp)
2012	89.747.523	6.281.318	21.060.631	1.454.467
2013	89.805.172	6.641.468	20.998.869	1.536.357
2014	92.466.859	6.995.085	22.161.167	1.608.543
2015	92.273.593	7.341.493	22.545.606	1.691.301
2016	94.495.246	7.727.273	23.916.727	1.771.301

Sumber: Lampiran 1.1, 1.4.

Perbedaan penyebaran penanaman modal juga dapat menyebabkan ketimpangan antarwilayah. Berdasarkan Lampiran 1.6 bahwa jumlah investasi yang masuk di Kawasan Barat Indonesia lebih besar dibandingkan Kawasan Timur Indonesia. Perbedaan tersebut dikarenakan adanya *pull factors* dan *push factor*. Myrdal mengatakan bahwa investasi cenderung menambah ketidakmerataan (Adisasmita, 2005:37). Hal tersebut dikarenakan di wilayah maju, permintaan barang dan jasa akan mendorong naiknya investasi, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan, sebaliknya, di wilayah kurang maju, permintaan akan investasi rendah karena pendapatan masyarakat yang rendah. Selain itu, Barika (2012) dan Bakri, Syafrizal, dan Aimon (2016) juga menyatakan bahwa investasi mempunyai pengaruh yang positif terhadap ketimpangan pembangunan, artinya semakin tinggi investasi yang masuk di suatu daerah, maka akan meningkatkan ketimpangan pembangunan antardaerah.

Perbedaan kemajuan TIK juga dapat menyebabkan ketimpangan antarwilayah, karena kemajuan teknologi dapat mendorong peningkatan produktivitas wilayah. Dalam jangka panjang, kemajuan teknologi yang berkesinambungan akan meningkatkan *output* secara keseluruhan dan *output* per kapita. Pada tahun 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Perpres Nomor 32 Tahun 2011 tentang MP3EI, yang menjadi dasar dari seluruh kegiatan ekonomi Indonesia, dan juga sektor-sektor lain yang mendukung

pertumbuhan ekonomi, termasuk sektor TIK. Berdasarkan Lampiran 1.7 bahwa pembangunan TIK di Kawasan Barat Indonesia cenderung lebih cepat daripada di Kawasan Timur Indonesia, sehingga tidak mengherankan jika *output* yang dihasilkan secara keseluruhan lebih banyak dibandingkan Kawasan Timur Indonesia. Di sisi lain, TIK juga dapat berdampak pada pengurangan ketimpangan, jika tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat dapat menyebarkan efek pertumbuhan yang diperoleh dari meningkatnya pendapatan dan kesempatan kerja ke wilayah sekitarnya (Quibria, 2001).

Aglomerasi industri juga dapat mendorong ketimpangan wilayah. Perroux menganggap industri sebagai titik awal perubahan unsur yang esensial untuk menunjang pembangunan selanjutnya (Adisasmita, 2005:61). Adanya sektor industri memungkinkan dilakukannya pemusatan industri yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, di sisi lain, pemusatan industri justru mendorong ketimpangan antarwilayah. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Hirschman bahwa terjadinya konsentrasi pembangunan disebabkan oleh faktor-faktor di daerah maju yang mempengaruhi dan menghambat pembangunan di daerah tertinggal. Faktor-faktor yang menghambat tersebut dinamakan *polarization effect* yang dapat menimbulkan ketimpangan antarwilayah.

Berdasarkan Lampiran 1.8 bahwa kegiatan industri di Kawasan Barat Indonesia terkonsentrasi di Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Banten, sedangkan di Kawasan Timur Indonesia terkonsentrasi di Provinsi Papua Barat yang dibuktikan dengan nilai indeks Balassa lebih dari satu. Kaldor (1970) berasumsi bahwa wilayah dengan kegiatan utama industri pengolahan akan memperoleh peningkatan *return to scale* (Dawkins, 2003). Hal ini mengindikasikan bahwa wilayah dengan kegiatan utama sektor industri pengolahan akan mendapat keuntungan produktivitas yang lebih besar dibandingkan dengan wilayah yang bergantung pada sektor primer, sehingga akan terjadi perbedaan pertumbuhan di dua wilayah tersebut.

Berdasarkan kajian teoritis dan empiris, tidak heran jika kesenjangan antar Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia cenderung masih tinggi.

Hal ini dikarenakan Kawasan Barat Indonesia merupakan pusat perekonomian, pusat penduduk, dan sebagainya. Faktor-faktor yang diduga menyebabkan ketimpangan di dua kawasan tersebut adalah perbedaan tenaga kerja, penyebaran penanaman modal atau investasi yang tidak merata, perbedaan kemajuan teknologi, dan adanya konsentrasi ekonomi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka pokok permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tingkat ketimpangan wilayah antar Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia tahun 2012-2016?
2. Apakah tenaga kerja, penanaman modal, teknologi informasi dan komunikasi, dan aglomerasi secara parsial mempunyai pengaruh terhadap ketimpangan wilayah di Kawasan Barat Indonesia tahun 2012-2016?
3. Apakah tenaga kerja, penanaman modal, teknologi informasi dan komunikasi, dan aglomerasi secara parsial mempunyai pengaruh terhadap ketimpangan wilayah di Kawasan Timur Indonesia tahun 2012-2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat ketimpangan wilayah di Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia tahun 2012-2016.
2. Untuk menganalisis secara parsial pengaruh tenaga kerja, penanaman modal, teknologi informasi dan komunikasi, aglomerasi terhadap ketimpangan wilayah di Kawasan Barat Indonesia tahun 2012-2016.
3. Untuk menganalisis secara parsial pengaruh tenaga kerja, penanaman modal, teknologi informasi dan komunikasi, dan aglomerasi terhadap ketimpangan wilayah di Kawasan Timur Indonesia tahun 2012-2016.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan pengkajian, yaitu:

a. Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan pengembangan ilmiah bagi peneliti-peneliti lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pengkajian untuk mengevaluasi pembangunan di Indonesia selama tahun 2012-2016, apakah ketimpangan pembangunan mengarah kepada tendensi *divergance* atau *convergence*; dan sebagai masukan bagi Bappenas dan Bappeda untuk menyusun perencanaan pembangunan di masa yang akan datang.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi

a. Teori Klasik

Adam Smith adalah salah satu penganut teori klasik. Kaum fisiokrat menganggap alam yang paling menentukan kemakmuran negara, sebaliknya, teori klasik Adam Smith (1729-1790) menganggap bahwa manusia adalah faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran negara (Deliarnov, 2014:30). Hal ini dikarenakan alam (tanah) tidak ada artinya jika tidak ada sumber daya manusia yang pandai mengolahnya sehingga bermanfaat bagi kehidupan. Teori Adam Smith juga melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif diperlukan pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, setelah itu baru diperlukan akumulasi modal. Dengan kata lain, alokasi sumber daya manusia merupakan *necessary condition* bagi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Adam Smith juga menekankan adanya pembagian kerja (*division of labor*) untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Jika produktivitas tenaga kerja meningkat, maka *output* yang dihasilkan akan meningkat pula sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Tahap pembangunan Adam Smith juga menekankan faktor produksi modal dan pemilik modal (kapitalis), karena pemilik modal mampu mengakumulasi modal yang diperoleh dari laba atau keuntungan usaha untuk kemudian ditanamkan kembali sebagai perluasan atau tambahan produksi dan untuk meningkatkan kapasitas produksi, sedangkan para pekerja yang dianggap tidak mampu mengakumulasi modal dan tidak memiliki tabungan karena upah yang diterima pekerja hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan subsisten. Akan tetapi, hal tersebut cenderung menciptakan masyarakat yang berkelas-kelas, yaitu masyarakat kelas kapitalis yang kaya raya dan masyarakat kelas buruh.

Adam Smith juga sangat mendukung motto *laissez faire-laissez passer*. Smith (dalam Deliarnov, 2014:32) menghendaki campur tangan pemerintah seminimal mungkin dalam perekonomian, biarkan sajalah perekonomian berjalan dengan wajar tanpa campur tangan pemerintah, nanti akan ada suatu tangan tak kentara

(*invisible hand*) yang akan membawa perekonomian ke arah keseimbangan. Jika terlalu banyak campur tangan pemerintah, perekonomian justru akan mengalami distorsi yang membawa perekonomian pada ketidakefisienan dan ketidakseimbangan. Dengan demikian, sistem ekonomi yang sesuai dengan pemikiran Adam Smith adalah sistem liberal atau kapitalis (karena memberikan keleluasaan yang besar bagi setiap individu untuk bertindak dalam perekonomian dan menekankan akumulasi modal dalam pembangunan).

b. Teori Neo-Klasik

Teori ekonomi neo-klasik berkembang sejak tahun 1950-an. Tokoh ekonomi yang menjadi perintis dalam mengembangkan teori tersebut adalah Robert Solow dan Trevor Swan. Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi tergantung pada penambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Teori ini menggunakan model fungsi produksi yang memungkinkan adanya substitusi antar input produksi yang sesuai dengan faktor produksi dengan asumsi *constant return to scale* dan elastisitas positif (substitusi) di antara input produksi (Dawkins, 2003:138).

Borts dan Stein (1964) memodifikasi model pertumbuhan ekonomi neo-klasik untuk konteks regional (Dawkins, 2003:138). Teori ini mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah ditentukan oleh potensi daerah bersangkutan, mobilitas tenaga kerja, dan mobilitas modal antardaerah (Sjafrizal, 2008:95). Dalam teori neo-klasik, tenaga kerja dan modal mudah berpindah dari wilayah satu ke wilayah lain sehingga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi wilayah. Menurut teori neo-klasik, untuk membangun kinerja perekonomian suatu negara dibutuhkan akumulasi modal (Sodik dan Nuryadin, 2005). Negara berkembang sangat memerlukan investasi, khususnya investasi asing disaat investasi dalam negeri tidak mencukupi untuk membiayai pembangunan.

Teori neo-klasik menyatakan bahwa PMA mempunyai kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi di *host country* (negara penerima investasi). Modal asing yang dibawa ke *host country* juga dapat mendorong penanaman modal dalam negeri untuk berbagai kegiatan. Sornarajah (dalam Zaidun, 2008)

mengatakan bahwa investasi asing secara keseluruhan menguntungkan *host country* sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.

c. Teori Schumpeter

Joseph Alois Schumpeter pertama kali mengemukakan teori pertumbuhan ekonominya dalam buku *Theory of Economic Development* yang terbit di Jerman tahun 1911, kemudian dibahas lebih lanjut dalam bukunya yang berjudul *Business Cycle* (1931) dan *Capitalism, Socialism, and Democracy* (1942). Menurut Schumpeter, faktor utama pembangunan terletak pada usaha melakukan kombinasi baru atau inovasi yang dilakukan oleh pengusaha atau *entrepreneur* (Jhingan, 2012:126). Kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya bisa diterapkan dengan adanya inovasi yang dilakukan oleh para wiraswasta. Menurut Schumpeter, inovasi terdiri dari pengenalan produk baru, pengenalan metode produksi baru, pembukaan pasar baru, penemuan sumber bahan mentah baru, dan pembentukan organisasi baru pada setiap industri (Jhingan, 2012:126). Inovasi yang dilakukan oleh wiraswasta akan mendorong kemajuan teknologi. TIK merupakan simbol revolusi teknologi saat ini dan dalam jangka panjang, kemajuan TIK yang berkesinambungan akan meningkatkan *output* secara keseluruhan dan *output* perkapita.

d. Teori Kutub Pertumbuhan (*Growth Pole Theory*)

Teori kutub pertumbuhan (*growth pole*) mula-mula dikemukakan oleh Francois Perroux, seorang ekonom bangsa Perancis pada tahun 1955. Perroux menyatakan bahwa pembangunan atau pertumbuhan tidak terjadi disemua wilayah, akan tetapi terbatas hanya pada beberapa tempat tertentu dengan variabel yang berbeda-beda intensitasnya (Adisasmita, 2005:60). Sebagaimana diketahui bahwa potensi dan kemampuan masing-masing wilayah berbeda satu sama lainnya sehingga pertumbuhan tidak muncul di setiap tempat secara serentak dan tidak dilakukan di seluruh tata ruang, tetapi terbatas pada beberapa tempat atau lokasi tertentu. Mengikuti pendapat Perroux, Hirschman (dalam Adisasmita, 2005:60) mengatakan bahwa untuk mencapai tingkat pendapatan yang lebih tinggi, terdapat keharusan untuk membangun sebuah atau beberapa pusat kekuatan ekonomi dalam

wilayah suatu negara, atau disebut sebagai pusat pertumbuhan (*growth point* atau *growth pole*).

Pusat pertumbuhan (*growth pole*) dapat diartikan dengan dua cara, yaitu secara fungsional dan secara geografis. Secara fungsional, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi konsentrasi kelompok usaha atau cabang industri yang karena sifat hubungannya memiliki unsur-unsur kedinamisan sehingga mampu menstimulasi kehidupan ekonomi baik kedalam maupun keluar (daerah belakangnya). Secara geografis, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi yang memiliki banyak fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik (*pole of attraction*) yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk berlokasi di daerah tersebut, walaupun tidak ada interaksi antar usaha-usaha tersebut (Tarigan, 2004:115).

Teori kutub pertumbuhan Perroux memberi bentuk konkrit pada aglomerasi. Perroux (dalam Adisasmita, 2005:61) menganggap industri sebagai titik awal perubahan unsur yang esensial untuk menunjang pembangunan selanjutnya. Adanya sektor industri memungkinkan dilakukannya pemusatan industri yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi, karena pemusatan industri akan menciptakan pola konsumsi yang berbeda antar daerah sehingga perkembangan industri di suatu daerah akan mempengaruhi perkembangan daerah lainnya. Konsentrasi industri di daerah tertentu didorong oleh adanya keuntungan aglomerasi yang timbul karena adanya konsentrasi kegiatan ekonomi tersebut. Bauchet (dalam Adisasmita, 2005:62) mengatakan bahwa pertumbuhan daerah-daerah yang kurang maju tergantung pada kegiatan dari unit-unit ekonomi yang besar. Davin (dalam Adisasmita, 2005:62) juga berpendapat bahwa pusat utama pertumbuhan ekonomi terdapat pada tempat-tempat yang memiliki industri berat dan berkapasitas tinggi, dan industri kimia.

Peranan kutub pertumbuhan dalam pengembangan wilayah adalah sebagai penggerak pertumbuhan, yang selanjutnya dapat menyebarkan hasil-hasil pembangunan dan dampak pertumbuhan ke wilayah pengaruhnya. Akan tetapi, teori kutub pertumbuhan dianggap tidak dapat membuktikan dampak tetesan ke bawah (*trickling down effect*) (Adisasmita, 2005:65). Hal ini dikarenakan daerah pusat pertumbuhan pada umumnya adalah kota-kota besar yang ternyata sebagai

pusat konsentrasi penduduk dan berbagai kegiatan sosial ekonomi sehingga mendorong adanya urbanisasi dalam wilayah pengaruh ke pusat pertumbuhan (polarisasi). Dampak polarisasi dapat menimbulkan dampak negatif terhadap wilayah pengaruh yang oleh Myrdal disebut *backwash effect* yang selanjutnya dapat menyebabkan ketimpangan antar wilayah.

Kegagalan teori kutub pertumbuhan dapat ditunjukkan oleh strategi kebijakan pembangunan daerah yang lebih banyak diarahkan pada wilayah perkotaan (Adisasmita, 2005:65). Pembangunan berbagai infrastruktur, utilitas, dan fasilitas pelayanan perkotaan yang meningkat akan menimbulkan kepadatan, kemacetan, dan polusi sehingga diperlukan campur tangan pemerintah untuk mengatasi dan menanggulangi dampak negatif yang ditimbulkan, sedangkan pembangunan di wilayah terbelakang menjadi terabaikan. Akibatnya, terjadi ketimpangan yang semakin tajam antara pusat pertumbuhan dengan wilayah pengaruhnya.

e. Teori Kumulatif Kausatif

Gunnar Myrdal dalam bukunya *Economic Theory and Underdeveloped Region* (1957) menjelaskan sebuah konsep yang dikenal sebagai kumulatif kausatif. Teori ini menjelaskan bahwa ketimpangan suatu daerah akan terjadi karena adanya konsentrasi ekonomi yang cukup tinggi di suatu wilayah sehingga membuat daerah belakangnya mengalami dampak kurang baik. Hal tersebut sesuai yang diungkapkan Arsyad sebagai berikut:

Teori kausasi kumulatif konsep dasarnya adalah adanya kondisi daerah-daerah di sekitar kota yang semakin buruk. Kekuatan-kekuatan pasar yang cenderung memperparah kesenjangan antara daerah-daerah yang maju dan daerah-daerah yang terbelakang. Daerah yang maju mengalami akumulasi keunggulan kompetitif dibanding daerah lainnya, seperti perpindahan modal cenderung menambah ketidakmerataan. Di daerah-daerah yang sedang berkembang permintaan barang dan jasa akan mendorong naiknya investasi, sedangkan di daerah-daerah yang kurang berkembang permintaan investasi rendah karena pendapatan masyarakatnya rendah. Semua perubahan untuk daerah-daerah yang dirugikan yang timbul karena adanya ekspansi ekonomi dari suatu daerah disebut *backwash effect* oleh Myrdal (Arsyad, 1999:301).

Myrdal (dalam Jhingan, 2012:211-212) mengatakan bahwa pembangunan ekonomi menghasilkan suatu proses sebab menyebab sirkuler yang membuat si kaya mendapat keuntungan semakin banyak, dan mereka yang tertinggal di belakang semakin terhambat sehingga dalam jangka panjang pendapatan perkapita antardaerah cenderung timpang. Ketimpangan pembangunan ekonomi antardaerah disebabkan adanya *backwash effect* yang mendominasi *spread effect*. Semakin kumulatif kecenderungan ini maka akan semakin memperburuk ketimpangan regional di negara-negara terbelakang.

Backwash effect adalah semua perubahan yang bersifat merugikan dari ekspansi suatu ekonomi disuatu tempat karena sebab-sebab di luar tempat itu (Jhingan, 2012:212). Ketimpangan regional akan semakin parah jika sebagian daerah tumbuh dengan merugikan wilayah lain yang mengalami stagnasi. Myrdal mengatakan bahwa daerah terbelakang kurang mampu berkembang secepat daerah maju karena adanya *backwash effect* yang menyebabkan daerah terbelakang menghadapi lebih banyak hambatan dalam mengembangkan ekonominya. Sebaliknya, *spread effect* menunjuk pada momentum pembangunan yang menyebar secara sentrifugal dari pusat pengembangan ekonomi ke wilayah-wilayah lainnya (Jhingan, 2012:212). Seluruh wilayah di sekitar sentra-sentra pengembangan akan memperoleh keuntungan dari meningkatnya pasar produk-produk pertanian dan bersamaan dengan itu terangsang ke arah kemajuan teknik.

Menurut Mahyudi (2004:222), faktor-faktor *spread effects* yaitu adanya permintaan barang-barang pertanian dari daerah maju ke daerah tidak maju dan permintaan hasil industri rumah tangga dan barang konsumsi dari daerah maju ke daerah tidak maju, sedangkan faktor-faktor *backwash effects* terdiri atas:

1. Terjadinya pemusatan atau penarikan tenaga kerja, terutama yang memiliki keahlian dan produktif dari daerah yang tidak maju ke daerah yang sangat maju.
2. Terjadinya pemusatan faktor produksi modal dari daerah yang tidak maju ke daerah yang sangat maju.
3. Terjadinya pemusatan pola perdagangan yang lebih lengkap di daerah yang maju dibandingkan daerah yang tidak maju.

4. Keadaan jaringan pengangkutan atau sarana dan prasarana transportasi lebih lengkap dan cepat di daerah yang sangat maju dibandingkan di daerah yang tidak maju (Mahyudi, 2004:221).

Apabila *spread effect* lebih besar dibandingkan *backwash effect* ini berarti tidak akan terjadi masalah, namun kenyataannya di daerah-daerah miskin, *spread effect* yang terjadi jauh lebih kecil dibandingkan *backwash effect*. Hal ini berarti bahwa secara keseluruhan ekspansi ekonomi yang dilakukan oleh daerah kaya justru memperlambat pembangunan daerah miskin sehingga menyebabkan semakin lebarnya jurang kesejahteraan antara dua daerah tersebut. Jadi, interaksi antarwilayah pada sistem liberal cenderung memperburuk kinerja ekonomi wilayah yang belum berkembang (daerah miskin). Menurut Myrdal (dalam Adifa, 2007), kondisi ini memberikan pengesahan terhadap intervensi mekanisme pasar untuk mengatasi *backwash effect* yang dapat menimbulkan ketimpangan wilayah.

Seperti Myrdal, Kaldor (1970) berasumsi bahwa wilayah akan memperoleh peningkatan *return to scale*, terutama dalam kegiatan manufaktur (Dawkins, 2003). Hal ini berarti bahwa wilayah dengan kegiatan utama sektor industri pengolahan akan mendapat keuntungan produktivitas yang lebih besar dibandingkan dengan wilayah yang bergantung pada sektor primer, sehingga wilayah dengan sektor industri akan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan wilayah yang bergantung pada sektor primer.

Berbeda dengan proses penyebab kumulatif Myrdal-Kaldor yang dapat menimbulkan divergensi antar wilayah, Dixon dan Thirwall (dalam Dawkins, 2003:139) menunjukkan bahwa penyebab kumulatif belum tentu memprediksi divergensi antar wilayah, sebagai gantinya, perbedaan pertumbuhan regional didukung oleh efek *Verdoorn*. Pertumbuhan *output* wilayah menentukan tingkat perubahan teknologi dan pertumbuhan rasio modal dan tenaga kerja. Kedua faktor tersebut lebih lanjut akan menentukan pertumbuhan dan tingkat produktivitas wilayah. Pertumbuhan ekspor suatu wilayah bergantung pada daya saing relatif terhadap wilayah lainnya, dengan kata lain, pertumbuhan wilayah bergantung pada produktivitas wilayah itu sendiri, dan apabila terjadi peningkatan produktivitas maka akan mempengaruhi pertumbuhan dan tingkat ekspor wilayah. Pada masalah

ini, proses penyebab kumulatif pertumbuhan ekonomi akan terjadi secara menyeluruh, karena pertumbuhan ekspor menentukan pertumbuhan output wilayah. Keterkaitan antara pertumbuhan output wilayah dan pertumbuhan produktivitas dikenal sebagai efek *Verdoon* (Adifa, 2007).

f. Teori *Trickling Down/Polarization Effect*

Seperti Myrdal, dalam hubungan dampak penyebaran pertumbuhan ke wilayah sekitarnya, Albert Hirschman memperkenalkan istilah *trickling down effect* atau dampak tetesan ke bawah (Adisasmita, 2005:65). *Trickling down effect* dimaksudkan untuk memperbaiki kelemahan penduduk miskin yang memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah dan untuk mengurangi hambatan dalam struktur dan peluang penduduk miskin menghadapi sisi permintaan pasar tenaga kerja (Adisasmita, 2005:19).

Di suatu wilayah terdapat beberapa titik pertumbuhan, dimana industri berkonsentrasi di tempat tersebut karena diperoleh beberapa manfaat dalam bentuk penghematan-penghematan atau kemudahan-kemudahan. Konsentrasi kegiatan di daerah-daerah pusat pertumbuhan akan menyebabkan kesempatan investasi, lapangan kerja, dan upah buruh relatif lebih tinggi di daerah pusat pertumbuhan daripada di daerah belakang. Jika komplementarisasi kuat antara daerah pusat pertumbuhan dengan daerah belakang maka akan terjadi proses penyebaran pembangunan ke daerah-daerah belakang (*trickling down*), sebaliknya jika komplementarisasi lemah maka akan terjadi pengaruh polarisasi (Adisasmita, 2005:166).

Hirschman percaya bahwa terjadinya konsentrasi pembangunan disebabkan oleh faktor-faktor di daerah maju yang mempengaruhi dan menghambat pembangunan di daerah tertinggal. Faktor-faktor yang menghambat tersebut dinamakan *polarization effect*, namun juga terdapat kekuatan yang bersumber di daerah maju yang akan mempengaruhi pembangunan di daerah tertinggal yang disebut dengan *trickling down effect* (Hartono, 2008). Jika pengaruh polarisasi lebih kuat dari pengaruh penyebaran pembangunan maka akan timbul masyarakat dualistik, yaitu selain memiliki ciri-ciri daerah perkotaan *modern* juga memiliki daerah pedesaan terbelakang. Untuk memperkecil pengaruh polarisasi, Hirschman

menyarankan agar membentuk lebih banyak titik pertumbuhan untuk menciptakan pengaruh-pengaruh penyebaran pembangunan yang efektif.

Pandangan Hirschman dan Myrdal diperkuat dengan penelitian Williamson bahwa disparitas regional lebih besar di negara-negara berkembang dan lebih kecil di negara maju, disparitas ini semakin lama semakin meningkat di negara-negara berkembang, sebaliknya akan menurun di negara-negara maju. Penelitian Williamson menunjukkan bahwa ketidakmerataan regional jika digambarkan dalam kaitannya dengan perkembangan ekonomi akan menghasilkan kurva berbentuk U terbalik.

g. Teori Ketergantungan (*Dependency Theory*)

Kajian *dependencia* muncul pada tahun 1960-an di Amerika Latin. Teori ini menjelaskan penyebab keterbelakangan ekonomi yang dialami negara sedang berkembang. Teori ini didasarkan pada teori keunggulan komparatif (*comparative advantages*) yang dimiliki oleh setiap negara, dan adanya spesialisasi produksi pada tiap-tiap negara sesuai dengan keuntungan komparatif yang mereka miliki. Asumsi yang digunakan adalah pembagian perekonomian dunia menjadi dua golongan, yaitu perekonomian negara maju (industri) dan perekonomian negara berkembang (pertanian).

Paul Pebrisch (dalam Ruslin, 2012) menyatakan bahwa ketergantungan memberikan dampak negatif bagi negara pinggiran (pertanian). Adanya spesialisasi memungkinkan terjadinya perdagangan internasional, dengan asumsi perdagangan diharapkan akan menguntungkan kedua belah pihak. Negara-negara pertanian dapat membeli barang-barang industri secara lebih murah (daripada memproduksi sendiri), dan sebaliknya, negara-negara industri dapat membeli hasil-hasil pertanian secara murah (dibandingkan harus memproduksi sendiri), sehingga terjadi keuntungan komparatif yang didasarkan pada *opportunity cost*. Dengan kata lain, pembangunan yang paling baik menurut teori ini adalah pembangunan yang meleburkan diri ke dalam kegiatan ekonomi, karena pada dasarnya negara saling bergantung satu sama lain dan akan lebih menguntungkan jika negara-negara saling mengisi kelemahan yang ada. Namun kenyataannya, justru tercipta kesenjangan (*gap*) besar di kedua negara tersebut. Negara yang berspesialisasi di bidang industri

semakin kaya, sedangkan negara yang berspesialisasi di bidang pertanian semakin tertinggal.

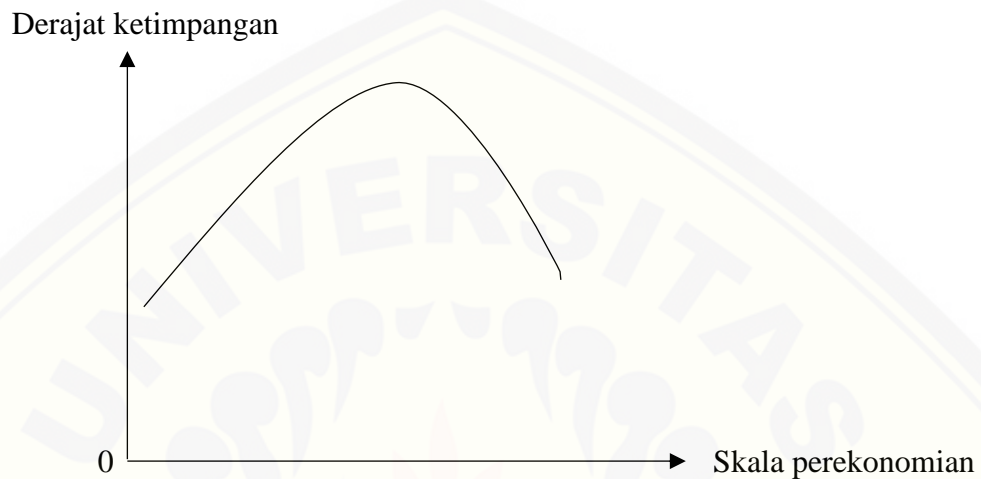
Tokoh Teori Ketergantungan lainnya yaitu Paul Baran, seorang pemikir Neo-Marxis yang menentang pendapat Marx bahwa negara-negara kapitalis maju akan menularkan sistem kapitalismenya ke negara berkembang. Menurut Paul Baran, sentuhan kapitalisme justru menghambat kemajuan negara prakapitalis sehingga akan terus dalam kondisi keterbelakangan (Ruslin, 2012). Andre Gunder Frank menitikberatkan pada pola hubungan antara modal asing dengan kelas-kelas yang berkuasa di negara maju. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang terjadi di negara maju hanya menguntungkan pemilik modal asing, dimana keuntungan yang diperoleh tidak akan pernah menetes kebawah (*trickle down effect*) (Ruslin, 2012). Sementara itu, Dos Santos justru lebih optimis pada perkembangan negara pinggiran. Menurut Dos Santos, negara-negara pinggiran setelah mengadakan hubungan dengan negara-negara pusat masih ada kemungkinan untuk berkembang, meskipun dalam konteks perkembangan dalam ketergantungan (Ruslin, 2012).

2.1.2 Ketimpangan Pembangunan Wilayah

Ketimpangan pembangunan merupakan suatu kondisi ketidakmerataan pembangunan antarsektor dan antarwilayah yang ditunjukkan oleh perbedaan pertumbuhan antarwilayah. Perbedaan pertumbuhan antarwilayah bergantung pada pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dan struktur wilayah. Perkembangan sarana dan prasarana pembangunan, transportasi dan komunikasi, komposisi industri, teknologi, situasi ekonomi dan perdagangan antar wilayah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah, investasi, kesempatan kerja, dan lainnya saling berpengaruh dengan sektor-sektor ekonomi dalam menciptakan ketimpangan wilayah.

Permasalahan ketimpangan pembangunan antarwilayah pertama kali dimunculkan oleh Douglas C. North dalam analisisnya tentang Teori Pertumbuhan Neo-klasik. Dalam teori tersebut dimunculkan sebuah prediksi tentang hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi suatu negara dengan ketimpangan. Hipotesa tersebut biasa dikenal sebagai Hipotesa Neo-klasik (Sjafrizal, 2008:105).

Berdasarkan Hipotesa Neo-Klasik, pada permulaan proses pembangunan di suatu negara, ketimpangan pembangunan antarwilayah cenderung meningkat hingga mencapai titik tertentu. Kemudian, apabila proses pembangunan terus berlanjut, secara berangsur-angsur ketimpangan wilayah akan menurun (Gambar 2.1).



Gambar 2.1 Kurva Ketimpangan Regional

Teori Kumulatif Kausatif juga menjelaskan bahwa ketimpangan wilayah terjadi karena adanya konsentrasi ekonomi yang cukup tinggi di suatu wilayah sehingga membuat wilayah belakangnya mengalami dampak kurang baik (*backwash effect*). Sementara itu, menurut Teori Dependensi, ketergantungan justru membawa dampak negatif bagi negara berkembang. Ketergantungan merupakan suatu keadaan dimana kegiatan ekonomi negara-negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari negara lain, dan negara-negara tersebut hanya berperan sebagai penerima akibat saja (Dos Santos dalam Ruslin, 2012). Pada dasarnya, negara saling bergantung satu sama lain dan akan lebih menguntungkan jika negara-negara saling mengisi kelemahan yang ada. Namun kenyataannya, justru tercipta kesenjangan (*gap*) besar di kedua negara tersebut. Negara yang berspesialisasi di bidang industri semakin kaya, sedangkan negara yang berspesialisasi di bidang pertanian semakin tertinggal.

2.1.3 Tenaga Kerja

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Menurut Badan Pusat Statistik, yang dimaksud tenaga kerja adalah penduduk yang memasuki usia kerja (penduduk yang berusia 15 tahun ke atas). Penduduk usia kerja dibagi menjadi dua golongan, yaitu penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja dan penduduk usia kerja yang termasuk bukan angkatan kerja.

Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran). Angkatan kerja yang digolongkan bekerja adalah:

1. Mereka yang dalam seminggu sebelum pencacahan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan yang lama bekerja paling sedikit selama satu jam dalam seminggu yang lalu.
2. Mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan tidak melakukan pekerjaan atau bekerja kurang dari satu jam tetapi mereka adalah:
 - a. Pekerja tetap, pegawai pemerintah atau swasta yang saling tidak masuk kerja karena cuti, sakit, mogok, mangkir ataupun perusahaan menghentikan kegiatan sementara.
 - b. Petani yang mengusahakan tanah pertanian yang tidak bekerja karena menunggu hujan untuk menggarap sawah.
 - c. Orang yang bekerja di bidang keahlian, seperti dokter, dalang, dan lain-lain.

Angkatan kerja yang digolongkan menganggur dan sedang mencari pekerjaan yaitu mereka yang belum pernah bekerja, tetapi saat ini sedang berusaha mencari pekerjaan; mereka yang sudah pernah bekerja, tetapi pada saat pencacahan menganggur dan berusaha mendapatkan pekerjaan; dan mereka yang dibebaskan tugas dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih

sekolah, mengurus rumah tangga (tanpa mendapatkan upah), atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi (yaitu mereka yang pensiun, orang-orang yang cacat jasmani yang tidak melakukan sesuatu pekerjaan seminggu yang lalu).

Berdasarkan jumlah jam kerjanya, tenaga kerja dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Tenaga kerja penuh (*full employed*), yaitu tenaga kerja yang mempunyai jumlah jam kerja lebih dari 35 jam dalam seminggu dengan hasil kerja tertentu sesuai dengan uraian tugas.
2. Tenaga kerja tidak penuh atau setengah pengangguran (*under employed*), adalah tenaga kerja dengan jam kerja kurang dari 35 jam dalam seminggun.
3. Tenaga kerja yang belum bekerja atau sementara tidak bekerja (*unemployed*), yaitu tenaga kerja dengan jam kerja $0 > 1$ jam per minggu.

2.1.4 Penanaman Modal

Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia (UU RI No. 25 Tahun 2007). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, tujuan penyelenggaraan penanaman modal antara lain untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,
- b. menciptakan lapangan kerja,
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan,
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional,
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional,
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan,
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007, PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam

modal dalam negeri. PMDN adalah kegiatan untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

PMA dan PMDN diperlukan untuk memacu pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi serta memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan dapat menurunkan ketimpangan antarwilayah. Akan tetapi, semakin banyak investasi yang masuk ke suatu wilayah dapat menyebabkan ketimpangan. Hal ini sesuai dengan pendapat Myrdal (dalam Adisasmita, 2005:37) yang mengatakan bahwa investasi cenderung menambah ketidakmerataan. Hal ini dikarenakan di wilayah maju, permintaan barang dan jasa akan mendorong naiknya investasi, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan. Sebaliknya, di wilayah kurang maju, permintaan akan investasi rendah karena pendapatan masyarakat yang rendah.

2.1.5 Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pada tahun 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Perpres Nomor 32 Tahun 2011 tentang MP3EI. Peraturan ini menjadi dasar dari seluruh kegiatan ekonomi Indonesia, dan juga sektor-sektor lain yang mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk sektor TIK. Dalam MP3EI, sektor TIK menjadi salah satu komponen untuk mewujudkan konektivitas nasional. Menurut Munir (dalam Terranova, 2016), TIK diuraikan menjadi dua makna, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi memiliki pengertian pengolahan data elektronik (*electronic data processing*). Mengacu pada Munir, Martin mendefinisikan teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan mencakup teknologi komunikasi untuk mengirim informasi.

Menurut Schumpeter, faktor utama pembangunan terletak pada usaha melakukan kombinasi baru atau inovasi yang dilakukan oleh pengusaha atau *entrepreneur* (Jhingan, 2012:126). Kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya bisa diterapkan dengan adanya inovasi yang dilakukan oleh para wiraswasta. Dalam

beberapa tahun terakhir, inovasi dalam TIK sangat diperlukan, dimana TIK mempunyai pengaruh yang positif terhadap produktivitas (Houben dan Kakes dalam Iscan, 2012). Ramlan et al. (2007, dalam Terranova, 2016) menunjukkan bahwa TIK mempunyai pengaruh positif terhadap *total factor production* yang selanjutnya berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan menggunakan tingkat pengguna internet, pengguna telepon tetap kabel, dan pengguna telepon seluler sebagai faktor-faktor dari TIK.

Penelitian Farhadi et al. (2012) menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara GDP per kapita dengan TIK. Di negara yang memiliki GDP per kapita tinggi, terdapat korelasi yang kuat antara TIK dengan GDP per kapita, sebaliknya, di negara yang memiliki GDP per kapita rendah, korelasi antara TIK dengan GDP per kapita tidak begitu kuat. Penelitian Iscan (2012) juga menyimpulkan bahwa terdapat korelasi yang kuat antara TIK dengan GDP. Sementara itu, menurut Kim (2003) bahwa *information networking* mempunyai pengaruh negatif terhadap disparitas pendapatan di Korea. Selain itu, secara teoritis perkembangan TIK tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga berpengaruh terhadap kesempatan kerja (Iscan, 2012). Dengan kata lain, TIK merupakan faktor pendorong pertumbuhan ekonomi dan selanjutnya dapat berdampak pada pengurangan kemiskinan. Dampak tersebut akan lebih efektif jika tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat dapat menyebarkan efek pertumbuhan yang diperoleh dari meningkatnya pendapatan dan kesempatan kerja ke wilayah sekitarnya (Quibria, 2001).

2.1.6 Aglomerasi

Istilah aglomerasi muncul berawal dari ide Marshall tentang penghematan aglomerasi (*agglomeration economies*) atau dalam istilah Marshall disebut industri yang terlokalisasi (*localized industries*). Montgomery (dalam Kuncoro, 2012:222-223) mendefinisikan aglomerasi sebagai konsentrasi spasial dari aktivitas ekonomi kawasan perkotaan yang diakibatkan adanya *economies of proximity* yang diasosiasikan dengan kluster spasial dari perusahaan, para pekerja, dan konsumen. Perspektif klasik percaya bahwa aglomerasi merupakan suatu bentuk eksternalitas

spasial yang diakibatkan adanya *economies of proximity* yang pada gilirannya akan meningkatkan skala usaha akibat skala ekonomis (Kuncoro, 2012:224).

Teori kutub pertumbuhan Perroux memberi bentuk konkrit pada aglomerasi. Perroux (dalam Adisasmita, 2005:61) menganggap industri pendorong sebagai titik awal perubahan unsur yang esensial untuk menunjang pembangunan selanjutnya. Adanya sektor industri memungkinkan dilakukannya pemusatan industri yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi, karena pemusatan industri akan menciptakan pola konsumsi yang berbeda antardaerah sehingga perkembangan industri disuatu daerah akan mempengaruhi perkembangan daerah lainnya. Menurut Adisasmita (2005:46), manfaat atau keuntungan berlokasi di tempat konsentrasi kegiatan ekonomi, yaitu penghematan skala (*economic of scale*), penghematan lokasi (*localization economies* atau *economic of agglomeration*), dan penghematan urbanisasi (*urbanization economies*).

Economic of scale adalah keuntungan karena dapat memproduksi berdasarkan spesialisasi sehingga produksi lebih besar dan biaya per unit lebih efisien. Krugman dan Venables (1990) dalam Kuncoro (2012:229) menyatakan bahwa kecenderungan untuk berlokasi di dalam pasar yang lebih besar ternyata lebih kuat jika biaya perdagangan tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. *Economic of agglomeration* adalah keuntungan karena di tempat itu terdapat berbagai keperluan dan fasilitas yang dapat digunakan oleh perusahaan. Keuntungan urbanisasi (*urbanization economies*) adalah keuntungan yang diperoleh karena aglomerasi beberapa industri dalam suatu daerah akan mengakibatkan banyak tenaga kerja yang tersedia tanpa membutuhkan latihan khusus untuk suatu pekerjaan tertentu dan semakin mudah memperoleh tenaga-tenaga yang berbakat.

2.2 Penelitian Terdahulu

Ketimpangan wilayah merupakan masalah yang banyak dialami oleh beberapa negara berkembang, salah satunya Negara Indonesia. Ketimpangan pembangunan merupakan suatu kondisi ketidakmerataan pembangunan antarsektor dan antarwilayah yang ditunjukkan oleh perbedaan pertumbuhan antarwilayah. Perbedaan pertumbuhan antarwilayah bergantung pada pertumbuhan sektor-sektor

ekonomi dan struktur wilayah. Perkembangan sarana dan prasarana pembangunan, transportasi dan komunikasi, komposisi industri, teknologi, situasi ekonomi dan perdagangan antarwilayah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah, investasi, kesempatan kerja, dan lainnya saling berpengaruh dengan sektor-sektor ekonomi dalam menciptakan ketimpangan pembangunan wilayah.

Dalam perkembangannya, berbagai studi telah banyak dilakukan terkait dengan pengukuran kinerja pembangunan wilayah dengan istilah yang berbeda. Beberapa istilah yang sering muncul, antara lain perbandingan pembangunan regional, disparitas pembangunan, dan ketimpangan pembangunan. Meskipun menggunakan istilah yang berbeda, pada dasarnya berbagai kajian tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu melihat perbedaan antarwilayah.

Penelitian Angelia (2010) tentang Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 1995-2008. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung tingkat ketimpangan wilayah di Provinsi DKI Jakarta, membuktikan Hipotesis Kuznets, dan menganalisis pengaruh variabel independen PDRB perkapita, investasi, aglomerasi dan *dummy* desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi DKI Jakarta selama tahun 1995-2008. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dengan menggunakan pendekatan PDRB perkapita relatif tingkat ketimpangan di Provinsi DKI Jakarta selama tahun 1995-2008 masih tinggi, dan Hipotesis Kuznets terbukti di wilayah ini. Berdasarkan hasil regresi, variabel PDRB perkapita dan aglomerasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi DKI Jakarta, variabel investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi DKI Jakarta, sedangkan variabel *dummy* desentralisasi fiskal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi DKI Jakarta.

Penelitian Barika (2012) tentang Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2009. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu, mengidentifikasi pola pertumbuhan ekonomi menurut tipologi Klassen. Metode analisis yang digunakan meliputi analisis regresi,

analisis tipologi Klassen, dan analisis ketimpangan wilayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk dan investasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan daerah di Provinsi Bengkulu, sementara pengeluaran pemerintah tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap ketimpangan daerah di Provinsi Bengkulu.

Penelitian Kurniawan dan Sugiyanto (2013) tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, *Share* Sektor Industri dan Pertanian serta Tingkat Jumlah Orang yang Bekerja terhadap Ketimpangan Wilayah antar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2002-2010. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ketimpangan wilayah di Jawa Tengah, membuktikan Hipotesis Kuznets, dan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, *share* sektor industri dan pertanian serta tingkat jumlah orang yang bekerja terhadap ketimpangan wilayah antar kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2002-2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan wilayah di Jawa Tengah mengalami peningkatan dari tahun 2002-2010, dan hipotesis Kuznets terbukti untuk Provinsi Jawa Tengah. Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2002-2010. Variabel *share* sektor pertanian dan *share* sektor industri pengolahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2002-2010. Variabel tingkat jumlah orang yang bekerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2002-2010.

Penelitian Hakim (2014) tentang Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesenjangan Pendapatan di Wilayah Tapal Kuda Provinsi Jawa Timur Tahun 2001-2011, dengan variabel pertumbuhan ekonomi, aglomerasi, tenaga kerja, dan PDRB dan alat analisis indeks Williamsom dan regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kesenjangan pendapatan di wilayah tapal kuda Provinsi Jawa Timur relatif rendah. Secara parsial, PDRB dan aglomerasi mempunyai pengaruh dan signifikan terhadap kesenjangan pendapatan, sedangkan pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja tidak mempunyai pengaruh terhadap kesenjangan pendapatan.

Penelitian Ginting (2014) tentang Ketimpangan Pembangunan di Indonesia, yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan ketimpangan antar wilayah di Indonesia dan menganalisis pengaruh variabel PDRB perkapita, investasi, dan aglomerasi terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tahun 2004-2012 Indeks Williamson untuk Indonesia bagian timur lebih tinggi dibandingkan dengan Indeks Williamson untuk Indonesia bagian barat. Berdasarkan hasil regresi, variabel PDRB perkapita dan investasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah, sedangkan variabel aglomerasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia.

Penelitian Rosmeli dan Nurhayani (2014) tentang Studi Komperatif Ketimpangan Wilayah antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Kawasan Barat Indonesia selama tahun 2002-2010 memiliki ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan Kawasan Timur Indonesia, dengan rata-rata Indeks Williamson 0,83 dan rata-rata Indeks Williamson untuk Kawasan Timur Indonesia sebesar 0,45. Berdasarkan hasil analisis korelasi Pearson diketahui bahwa tenaga kerja mempunyai hubungan negatif dan sangat kuat terhadap ketimpangan wilayah di Kawasan Barat Indonesia, sedangkan di Kawasan Timur Indonesia, tenaga kerja mempunyai hubungan positif dan tidak begitu kuat terhadap ketimpangan wilayah.

Fithrian, Syechalad, dan Nasir (2015) tentang Analisis Pengaruh *Aggregat Demand* dan Tingkat Pendidikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *aggregat demand* dan tingkat pendidikan terhadap kesenjangan pendapatan di Aceh. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Berdasarkan hasil analisis, konsumsi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kesenjangan pendapatan di Aceh, pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kesenjangan pendapatan di Aceh, sementara investasi dan tingkat pendidikan tidak mempunyai pengaruh terhadap kesenjangan pendapatan di Aceh.

Penelitian Rosmeli (2015) tentang Dampak Investasi dan Tenaga Kerja terhadap Ketimpangan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat ketimpangan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia dan untuk mengetahui dampak investasi dan tenaga kerja terhadap ketimpangan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Dari hasil penelitian diketahui bahwa ketimpangan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia selama tahun 2000-2014 yang dihitung menggunakan Indeks Williamson mengalami penurunan dengan rata-rata indeks ketimpangan sebesar 0,41. Dari hasil regresi data panel diketahui bahwa PMDN mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Kawasan Timur Indonesia, sedangkan PMA dan tenaga kerja mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia.

Penelitian Bakri, Syafrizal, Aimon (2016) tentang Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dan Kebijakan Penanggulangannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi, tenaga kerja, dan dana perimbangan terhadap ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di Sumatera Barat, dana perimbangan mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di Sumatera Barat, dan tenaga kerja tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Pradnyadewi dan Purbadharmaja (2017) tentang Pengaruh IPM, Biaya Infrastruktur, Investasi dan Pertumbuhan terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Bali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan secara langsung maupun tidak langsung IPM, biaya infrastruktur, dan investasi pada ketimpangan distribusi pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Alat analisis yang digunakan yaitu *path analysis*. Berdasarkan hasil analisis, biaya infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh langsung dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi

pendapatan di Provinsi Bali, sementara IPM dan investasi tidak mempunyai pengaruh langsung dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Bali.



Tabel 2.1 Matrik Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Metode dan Variabel	Hasil Penelitian
1.	Angelia (2010)	Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 1995-2008	Metode analisis deskriptif dan analisis regresi OLS. Variabel Y: ketimpangan pembangunan wilayah, variabel X: PDRB perkapita, aglomerasi, investasi, dan desentralisasi fiskal.	Terjadi ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi DKI Jakarta dengan kategori ketimpangan yang tinggi, dan hipotesis Kuznets terbukti pada wilayah ini. Berdasarkan hasil regresi, variabel PDRB perkapita dan aglomerasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah, sedangkan variabel investasi berpengaruh negatif dan signifikan, dan variabel <i>dummy</i> desentralisasi fiskal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah.
2.	Barika (2012)	Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2009	Alat analisis yang digunakan yaitu analisis regresi, indeks Williamson, indeks Theil, analisis tipologi Klassen. Variabel yang digunakan ketimpangan daerah, pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk, dan investasi.	Berdasarkan hasil analisis, secara rata-rata dari tahun 2005-2009 ketimpangan daerah yang diukur menggunakan indeks Theil dan indeks Williamson cenderung mengalami fluktuasi. Dari hasil regresi, pertumbuhan penduduk dan investasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan daerah di Provinsi Bengkulu, sementara pengeluaran pemerintah tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan daerah di Provinsi Bengkulu.
3.	Kurniawan dan Sugiyanto (2013)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, <i>Share</i> Sektor Industri dan	Regresi data panel. Variabel yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan wilayah di Jawa Tengah mengalami peningkatan dari tahun 2002-2010, dan hipotesis Kuznets terbukti untuk Provinsi Jawa Tengah. Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan

Lanjutan Tabel 2.1

No.	Nama Peneliti	Judul	Metode dan Variabel	Hasil Penelitian
		Pertanian serta Tingkat Jumlah Orang yang Bekerja terhadap Ketimpangan Wilayah Antar Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2002-2010	<i>share</i> sektor industri dan pertanian, tingkat jumlah orang yang bekerja, dan ketimpangan wilayah.	terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2002-2010. Variabel <i>share</i> sektor pertanian dan <i>share</i> sektor industri pengolahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2002-2010. Variabel tingkat jumlah orang yang bekerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2002-2010.
4.	Hakim (2014)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesenjangan Pendapatan di Wilayah Tapal Kuda Provinsi Jawa Timur Tahun 2001-2011	Indeks Williamson dan regresi data panel. Variabel yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi, aglomerasi, tenaga kerja, PDRB, dan kesenjangan pendapatan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan pendapatan di wilayah tapal kuda Provinsi Jawa Timur dengan kategori relatif rendah. Secara parsial, PDRB dan aglomerasi berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan pendapatan, sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja tidak mempunyai pengaruh terhadap kesenjangan pendapatan.
5.	Ginting (2014)	Analisis Ketimpangan Pembangunan di Indonesia	Indeks Williamson, dan metode regresi data panel. Variabel yang digunakan adalah ketimpangan pembangunan antar	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan untuk Indonesia bagian timur lebih tinggi daripada bagian barat. Variabel PDRB perkapita dan investasi memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan antarwilayah, sedangkan variabel

Lanjutan Tabel 2.1

No.	Nama Peneliti	Judul	Metode dan Variabel	Hasil Penelitian
			wilayah, PDRB perkapita, investasi, dan aglomerasi.	aglomerasi memiliki pengaruh positif terhadap ketimpangan antar wilayah.
6.	Rosmeli dan Nurhayani (2014)	Studi Komperatif Ketimpangan Wilayah Antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia	Indeks Williamson, dan korelasi Pearson. Variabel yang digunakan adalah tenaga kerja dan ketimpangan wilayah.	Dari hasil penelitian diketahui bahwa Kawasan Barat Indonesia selama tahun 2002-2010 memiliki ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan Kawasan Timur Indonesia, dengan rata-rata Indeks Williamson 0,83 dan rata-rata Indeks Williamson untuk Kawasan Timur Indonesia sebesar 0,45. Berdasarkan hasil analisis korelasi Pearson diketahui bahwa tenaga kerja mempunyai hubungan negatif dan sangat kuat terhadap ketimpangan wilayah di Kawasan Barat Indonesia, sedangkan di Kawasan Timur Indonesia, tenaga kerja mempunyai hubungan positif dan tidak begitu kuat terhadap ketimpangan wilayah.
7.	Fithrian, Syechalad, dan Nasir (2015)	Analisis Pengaruh <i>Aggregat Demand</i> , dan Tingkat Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Aceh	Analisis regresi data panel. Variabel yang digunakan, yaitu kesenjangan pendapatam, konsumsi, pengeluaran pemerintah, investasi, dan tingkat pendidikan.	Dari hasil analisis, menunjukkan bahwa konsumsi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kesenjangan pendapatan di Provinsi Aceh, pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kesenjangan pendapatan di Provinsi Aceh, sementara investasi dan tingkat pendidikan tidak mempunyai pengaruh terhadap kesenjangan pendapatan di Provinsi Aceh.

Lanjutan Tabel 2.1

No.	Nama Peneliti	Judul	Metode dan Variabel	Hasil Penelitian
8.	Rosmeli (2015)	Dampak Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Ketimpangan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia	Analisis regresi data panel. Variabel yang digunakan adalah ketimpangan pembangunan, PMA, PMDN, tenaga kerja.	Dari hasil regresi data panel diketahui bahwa PMDN mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Kawasan Timur Indonesia, sedangkan PMA dan tenaga kerja mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia.
9.	Bakri, Syafrizal, Aimon (2016)	Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dan Kebijakan Penanggulangannya	Analisis regresi. Variabel penelitian terdiri dari ketimpangan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, investasi, dan dana perimbangan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di Sumatera Barat, dana perimbangan mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di Sumatera Barat, dan tenaga kerja tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di Sumatera Barat.
10.	Pradnyadewi dan Purbadharmaja (2017)	Pengaruh IPM, Biaya Infrastruktur, Investasi, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Bali	Alat analisis yang digunakan yaitu <i>path analysis</i> . Variabel yang digunakan ketimpangan pendapatan, IPM, biaya infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan investasi.	Dari hasil analisis, biaya infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh langsung dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Bali, sementara IPM dan investasi tidak mempunyai pengaruh langsung dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Bali.

2.3 Kerangka Konseptual

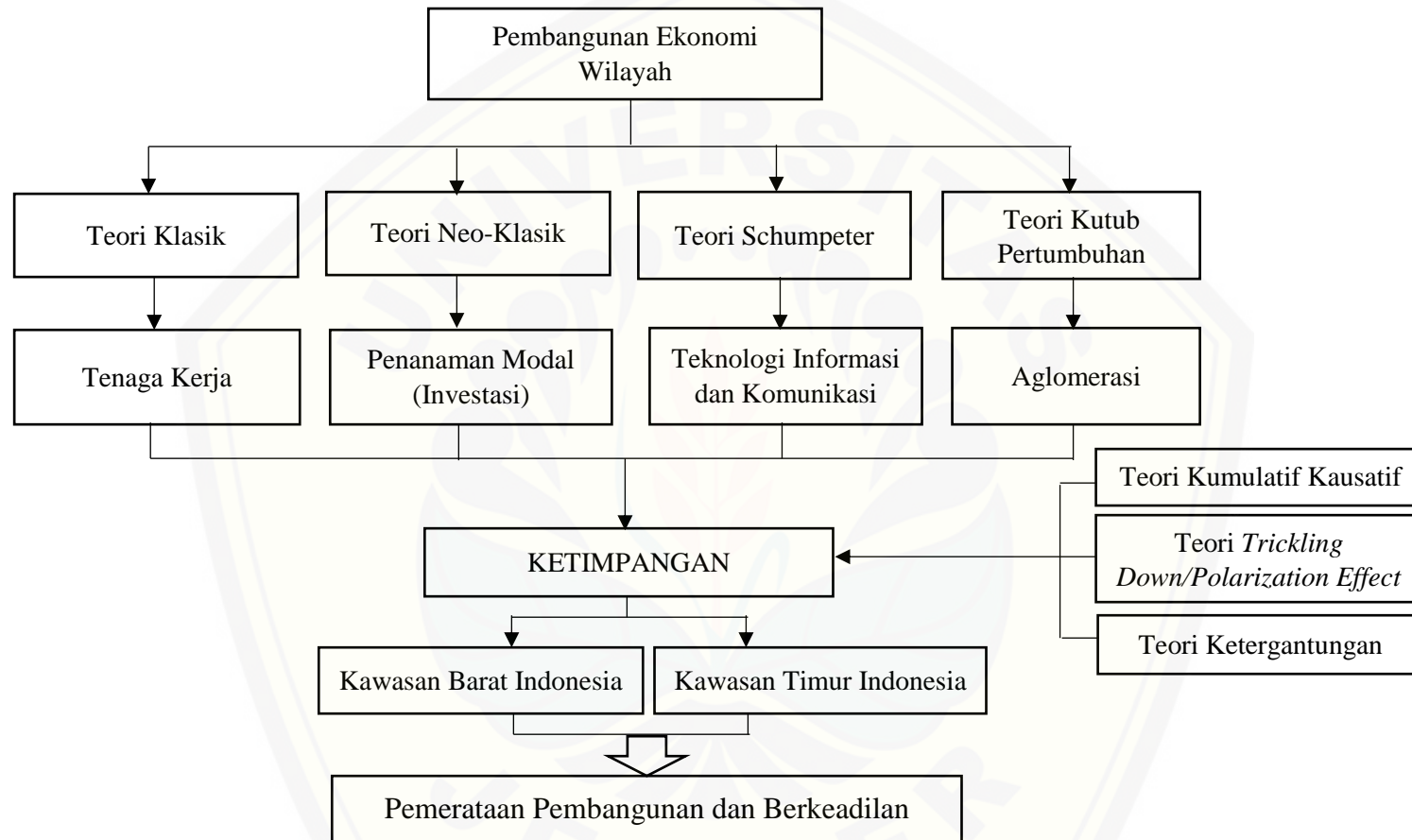
Penelitian ini membahas tentang ketimpangan wilayah antar Kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia. Ketimpangan wilayah merupakan masalah dan tantangan pembangunan di berbagai negara. Permasalahan ketimpangan yang harus ditelusuri adalah faktor-faktor apa sajakah yang mendorong ketimpangan tersebut. Permasalahan ketimpangan pembangunan antarwilayah pertama kali dimunculkan dalam Teori Neo-klasik. Dalam teori tersebut dimunculkan sebuah prediksi tentang hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi dengan ketimpangan pembangunan. Hipotesa ini kemudian lazim dikenal sebagai Hipotesa Neo-Klasik (Sjafrizal, 2008:105). Berdasarkan Hipotesa Neo-Klasik, pada umumnya ketimpangan pembangunan antarwilayah di negara-negara maju akan lebih rendah, sebaliknya di negara-negara sedang berkembang ketimpangan pembangunan antarwilayah cenderung tinggi yang disebabkan kurang lancarnya mobilitas faktor produksi (modal dan tenaga kerja). Akan tetapi apabila proses pembangunan terus berlanjut, pada suatu titik tertentu ketimpangan antar daerah akan menurun karena daerah-daerah tertinggal dengan sendirinya akan *convergen* dengan daerah yang lebih maju.

Menurut Teori Kumulatif Kausatif Myrdal bahwa ketimpangan regional disebabkan karena kuatnya *backwash effect* dan lemahnya *spread effect* (Jhingan, 2012:212). Hal ini berarti bahwa daerah kaya mengalami akumulasi keunggulan kompetitif dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Seperti Myrdal, dalam hubungan dengan penyebaran dampak pertumbuhan ke wilayah sekitarnya, Albert Hirschman memperkenalkan istilah *trickling down effect* atau dampak tetesan ke bawah (Adisasmita, 2005:65). Ketimpangan antarwilayah terjadi karena wilayah maju tidak mampu menyebarkan pertumbuhan ke wilayah sekitarnya. Menurut teori ketergantungan (*dependency theory*), bahwa ketergantungan memberikan dampak negatif bagi negara pinggiran (pertanian). Adanya spesialisasi produksi memungkinkan terjadinya perdagangan internasional, dengan asumsi perdagangan diharapkan akan menguntungkan kedua belah pihak. Dengan kata lain, pembangunan yang paling baik menurut teori ini adalah pembangunan yang meleburkan diri ke dalam kegiatan ekonomi, karena pada dasarnya negara saling

bergantung satu sama lain dan akan lebih menguntungkan jika negara-negara saling mengisi kelemahan yang ada. Namun kenyataannya, justru tercipta kesenjangan (*gap*) besar di kedua negara tersebut. Negara yang berspesialisasi di bidang industri semakin kaya, sedangkan negara yang berspesialisasi di bidang pertanian semakin tertinggal.

Menurut Schumpeter, faktor utama pembangunan terletak pada usaha melakukan kombinasi baru atau inovasi yang dilakukan oleh pengusaha atau *entrepreneur* (Jhingan, 2012:126). Kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya bisa diterapkan dengan adanya inovasi yang dilakukan oleh para wiraswasta. TIK merupakan simbol revolusi teknologi saat ini dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, di sisi lain, TIK dapat berdampak pada pengurangan ketimpangan, jika tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat dapat menyebarkan efek pertumbuhan yang diperoleh dari meningkatnya pendapatan dan kesempatan kerja ke wilayah sekitarnya (Quibria, 2001).

Menurut Teori Kutub Pertumbuhan (*growth pole theory*) bahwa peran kutub pertumbuhan dalam pengembangan wilayah adalah sebagai penggerak pertumbuhan, yang selanjutnya dapat menyebarkan hasil-hasil pembangunan ke wilayah pengaruhnya. Akan tetapi, daerah yang menjadi kutub pertumbuhan tidak mampu menyebarkan hasil-hasil pembangunan ke wilayah pengaruhnya. Hal ini dikarenakan daerah pusat pertumbuhan pada umumnya adalah kota-kota besar yang ternyata sebagai pusat konsentrasi penduduk dan berbagai kegiatan sosial ekonomi sehingga mendorong adanya urbanisasi dalam wilayah pengaruh ke pusat pertumbuhan (polarisasi). Dampak polarisasi inilah yang menyebabkan ketimpangan antarwilayah. Untuk mempermudah menjelaskan alur dan tujuan dalam penelitian ini, maka digambarkan kerangka konseptual yang disajikan dalam Gambar 2.2



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga masih terdapat ketimpangan wilayah antar Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia tahun 2012-2016.
2. Diduga secara parsial tenaga kerja, penanaman modal, teknologi informasi dan komunikasi, aglomerasi mempunyai pengaruh terhadap ketimpangan wilayah di Kawasan Barat Indonesia tahun 2012-2016.
3. Diduga secara parsial tenaga kerja, penanaman modal, teknologi informasi dan komunikasi, aglomerasi mempunyai pengaruh terhadap ketimpangan wilayah di Kawasan Timur Indonesia tahun 2012-2016.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian merupakan rencana kegiatan yang dibuat peneliti agar pelaksanaan penelitian dapat dilakukan dengan baik, benar, dan lancar serta diperoleh data yang valid sesuai dengan tujuan penelitian.

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dan *explanatory*. Jenis penelitian deskriptif kuantitatif yaitu menjelaskan perkembangan atau kondisi ketimpangan wilayah berdasarkan hasil perhitungan indeks Williamson dan indeks Theil. Jenis penelitian *explanatory* yaitu menjelaskan hubungan kausal antara variabel bebas dan variabel terikat melalui pengujian hipotesa.

3.1.2 Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia. Kawasan Barat Indonesia dalam penelitian ini meliputi Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali. Kawasan Timur Indonesia dalam penelitian ini meliputi Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua.

3.1.3 Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah indeks ketimpangan wilayah sebagai variabel terikat (*dependent variable*), sedangkan variabel bebasnya (*independent variable*) adalah tenaga kerja, penanaman modal, Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan aglomerasi.

3.1.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang berbentuk data panel, yaitu gabungan dari data *time series* dan *cross section* yang bersumber dari Badan Pusat Statistik tahun 2012-2016. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Produk Domestik Regional Bruto perkapita, kependudukan, tenaga kerja, IP-TIK, dan penanaman modal (PMA dan PMDN) menurut provinsi di Indonesia.

3.2 Metode Analisis Data

3.2.1 Analisis Ketimpangan Wilayah

Ketimpangan wilayah dalam penelitian ini diukur menggunakan indeks Williamson dan indeks Theil. Penggunaan indeks Theil dalam penelitian untuk melihat kontribusi wilayah dalam menciptakan ketimpangan, karena indeks Theil dapat didekomposisi menjadi dua, yaitu ketimpangan dalam grup dan ketimpangan antargrup. Nilai indeks Williamson dan indeks Theil terletak antara 0 sampai dengan 1, semakin mendekati 0, maka ketimpangan wilayah semakin rendah, tetapi jika mendekati 1, maka ketimpangan wilayah akan semakin tinggi dan mengindikasikan adanya ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi. Formulasi indeks Williamson untuk mengukur ketimpangan di kawasan barat dan kawasan timur Indonesia sebagai berikut (Bing, 2004):

$$I_w = \frac{\sqrt{\sum (y_i - y)^2 \cdot \frac{f_i}{n}}}{y}$$

Keterangan:

I_w : indeks Williamson

- y_i : PDRB perkapita wilayah i
 y : rata-rata PDRB perkapita untuk semua wilayah
 f_i : jumlah penduduk wilayah i
 n : total penduduk untuk semua wilayah

Kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah ketimpangan yang terjadi berada dikategori ketimpangan rendah, sedang, atau tinggi sebagai berikut:

- Nilai indeks Williamson antara 0 hingga 0,34: ketimpangan wilayah rendah.
- Nilai indeks Williamson antara 0,35 hingga 0,8: ketimpangan wilayah sedang.
- Nilai indeks Williamson lebih dari 0,8: ketimpangan wilayah tinggi.

Formulasi indeks Theil yang digunakan untuk mengetahui kontribusi wilayah dalam menciptakan ketimpangan, sebagai berikut (Bing, 2004):

$$IT = \sum_{i=1}^n Y_i/Y \log\left(\frac{Y_i/Y}{X_i/X}\right)$$

Indeks Theil dapat didekomposisi menjadi dua, yaitu ketimpangan dalam wilayah dan ketimpangan antarwilayah. Formulasi ketimpangan dalam wilayah sebagai berikut:

$$IT(\text{intra}) = \sum_{i=1}^n y_i/Y_i \log\left(\frac{y_i/Y_i}{x_i/X_i}\right) \quad IT(\text{antar}) = \sum_{i=1}^n Y_i/Y \log\left(\frac{Y_i/Y}{X_i/X}\right)$$

$$IT(\text{total}) = IT(\text{antar}) + \sum_{i=1}^n \left(\frac{Y_i}{Y}\right) \times IT(\text{intra})$$

Keterangan:

- IT : indeks Theil
 Y_i : PDRB wilayah i
 Y : total PDRB kawasan
 y_i : PDRB kabupaten/kota di wilayah i
 X_i : total penduduk wilayah i
 X : total penduduk di kawasan
 x_i : total penduduk kabupaten/kota di wilayah i

3.2.2 Analisis Regresi Data Panel

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan wilayah, baik di Kawasan Barat Indonesia maupun di Kawasan Timur Indonesia dianalisis menggunakan analisis regresi data panel. Analisis regresi data panel merupakan kombinasi antara *time series* dan *cross section*. Keunggulan menggunakan data panel antara lain: *pertama*, ada batasan heterogenitas dalam unit; *kedua*, data panel memberi lebih banyak informasi, lebih banyak variasi, sedikit kolinearitas antarvariabel, lebih banyak *degree of freedom*, dan lebih efisien; *ketiga*, cocok untuk mempelajari dinamika perubahan; *keempat*, data panel paling baik untuk mendeteksi dan mengukur dampak yang secara sederhana tidak dapat dilihat pada *time series* atau *cross section* murni; *kelima*, data panel memudahkan untuk mempelajari model perilaku yang rumit; *keenam*, dapat meminimumkan bias yang dalam agregasi besar (Gujarati, 2011:237).

a. Pemodelan Data Panel

Permodelan dengan menggunakan teknik regresi data panel dapat dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan alternatif, yaitu: (Gujarati, 2011:238-239)

1. *Pooled Least Square*, yaitu metode yang hanya menggabungkan data tanpa melihat sifat *cross section* dan *time series* pada data, dan dalam melakukan regresi *Ordinary Least Square* (OLS). Persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_p X_{pit} + \mu_{it}$$

Keterangan:

i = unit *cross section*

t = periode waktu

2. Metode *fixed effect*, yaitu metode dengan menggunakan variabel *dummy* (untuk menangkap adanya perbedaan intersep). Persamaan regresinya adalah:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 W_{1it} + D_{2it} + \epsilon_{it}$$

3. Metode *random effect*, yaitu metode dimana slope antarindividu adalah sama, tetapi intersep berbeda baik antarindividu maupun antarwaktu, namun rata-rata intersepnya adalah sama. Persamaan regresinya adalah:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_p X_{pit} + \varepsilon_{it} + \mu_{it}$$

b. Spesifikasi Model Data Panel

1. Uji *Chow/Likelihood*

Uji *chow* digunakan untuk memilih model terbaik apakah *Pooled Least Square* (PLS) atau *Fixed Effect Model* (FEM). Hipotesis nolnya adalah bahwa model yang tepat untuk regresi data panel adalah *pooled least square*, dan hipotesis alternatifnya adalah model yang tepat untuk regresi data panel adalah *fixed effect model*.

H_0 : *pooled least square*

H_a : *fixed effect model*

Apabila nilai probabilitasnya lebih kecil dari taraf signifikansi, maka hipotesis nol ditolak, artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *fixed effect*, begitu sebaliknya.

2. Uji *Langrange Multiplier* (LM)

Uji LM digunakan untuk memilih model terbaik apakah *Pooled Least Square* atau *Random Effect Model*. Uji LM didasarkan pada nilai residual dari metode *Pooled Least Square*. Adapun nilai statistik LM dihitung berdasarkan formula:

$$LM = \frac{nT}{2(T-1)} \left[\frac{\sum_{i=t}^n (T\hat{e}_i)^2}{\sum_{i=t}^n \sum_{t=1}^T e_{it}^2} - 1 \right]^2$$

Keterangan:

n : jumlah individu

T : jumlah periode

e : residual metode PLS

Hipotesis yang digunakan yaitu:

H_0 : *pooled least square*

H_a : *random effect model*

Uji LM didasarkan pada distribusi *chi-square* dengan *degree of freedom* sebesar jumlah variabel independen. Jika nilai LM statistik > nilai *chi-square*, maka H_0 ditolak. Artinya, model yang tepat untuk regresi data panel adalah *random effect model*, begitu juga sebaliknya.

3. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk memilih model terbaik apakah *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM). Hipotesis nolnya adalah bahwa model yang tepat untuk regresi data panel adalah *random effect model*, dan hipotesis alternatifnya adalah model yang tepat untuk regresi data panel adalah *fixed effect model*.

Ho : *random effect model*

Ha : *fixed effect model*

Apabila nilai probabilitas Hausman lebih kecil dari taraf signifikansi, maka hipotesis nol ditolak, artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah *fixed effect model*, begitu juga sebaliknya.

c. Estimasi Model Regresi

Model regresi dalam penelitian ini terdiri dari dua model, yaitu model regresi untuk Kawasan Barat Indonesia dan model regresi untuk Kawasan Timur Indonesia. Persamaan regresi yang akan diestimasi untuk Kawasan Barat Indonesia, sebagai berikut:

$$KW = \beta_0 + \beta_1 TK_{it} + \beta_2 PM_{it} + \beta_3 TIK_{it} + \beta_4 AGLO_{it} + \varepsilon_{it}$$

Sedangkan persamaan regresi yang akan diestimasi untuk Kawasan Timur Indonesia, sebagai berikut:

$$KW = \alpha_0 + \alpha_1 TK_{it} + \alpha_2 PM_{it} + \alpha_3 TIK_{it} + \alpha_4 AGLO_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

KW : ketimpangan wilayah yang diukur menggunakan indeks Williamson dan indeks Theil

TK : tenaga kerja yang diukur menggunakan persentase tenaga kerja yang bekerja terhadap total tenaga kerja.

PM : penanaman modal yang diukur dari realisasi PMA dan PMDN

TIK : teknologi informasi dan komunikasi yang diukur menggunakan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK).

AGLO : aglomerasi yang diproksi menggunakan indeks Balassa.

β_0, α_0 : konstanta atau intersep

$\beta_1 \dots \beta_4, \alpha_0 \dots \alpha_4$: koefisien

i : *crosssection*

t : *time series*

ε_{it} : eror

Adanya perbedaan satuan pada variabel yang digunakan, maka model ditransformasikan ke dalam model logaritma natural. Persamaan regresi untuk Kawasan Barat Indonesia, sebagai berikut:

$$\text{LNKW} = \beta_0 + \beta_1 \text{LNTK}_{it} + \beta_2 \text{LNPM}_{it} + \beta_3 \text{LNTIK}_{it} + \beta_4 \text{LNAGLO}_{it} + \varepsilon_{it}$$

Persamaan regresi untuk Kawasan Timur Indonesia, sebagai berikut:

$$\text{LNKW} = \alpha_0 + \alpha_1 \text{LNTK}_{it} + \alpha_2 \text{LNPM}_{it} + \alpha_3 \text{LNTIK}_{it} + \alpha_4 \text{LNAGLO}_{it} + \varepsilon_{it}$$

d. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi terdistribusi normal atau tidak. Normalitas dapat dilihat dari nilai probabilitas Jarque-Bera (JB), apabila nilai probabilitas lebih besar dari taraf signifikansi maka residual terdistribusi dengan normal.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya perbedaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Adanya heteroskedastisitas dalam data dapat diketahui dengan uji *White*, uji *Park*, uji *Glesjer*, uji *Wald*, sedangkan untuk mengatasi adanya masalah heteroskedastisitas dapat menggunakan *Generalized Least Square*.

3. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana faktor-faktor pengganggu yang satu dengan yang lain saling berhubungan. Untuk mengetahui adanya masalah autokorelasi dapat menggunakan uji *Durbin-Watson*, *Breusch-Godfret Test* dan *Wooldridge Test*.

4. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui korelasi linear yang tinggi diantara lebih dari dua variabel independen. Apabila di dalam model regresi terdapat korelasi yang tinggi di antara variabel bebas maka dinyatakan mengandung masalah multikolinearitas. Untuk mengetahui adanya multikolinearitas dapat dengan melihat nilai R^2 dan nilai t statistik. Jika nilai R^2 tinggi dan uji F menolak hipotesis nol, tetapi nilai t statistik sangat kecil atau tidak ada variabel bebas yang signifikan, maka hal tersebut menunjukkan gejala multikolinearitas.

e. Uji Statistik

1. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel bebasnya secara terhadap variabel terikat secara serentak. Uji F dapat dilakukan dengan membandingkan nilai F-statistik dengan F-tabel, atau membandingkan probabilitas F statistik dengan taraf signifikansi. Apabila nilai F-statistik lebih besar dari F-tabel atau nilai probabilitas F kurang dari taraf signifikansi, maka variabel bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat, sebaliknya, apabila nilai F-statistik lebih kecil dari F-tabel atau nilai probabilitas F lebih besar dari taraf signifikansinya, maka variabel bebas secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat.

2. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Uji t dapat dilakukan dengan membandingkan nilai t-statistik dengan t-tabel atau membandingkan nilai probabilitas t dengan taraf signifikansi. Apabila nilai t-statistik lebih besar dari t-tabel atau nilai probabilitas t kurang dari taraf signifikansi, maka secara parsial variabel bebas mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat, sebaliknya, apabila nilai t-statistik lebih kecil dari t-tabel atau nilai probabilitas t-statistik lebih besar dari taraf signifikansinya, maka secara parsial variabel bebas tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

R^2 atau *goodness of fit* digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat. Semakin besar nilai koefisien determinasi maka semakin tepat model regresi yang digunakan sebagai alat uji dalam penelitian.

3.3 Definisi Operasional Variabel

1. Kawasan Barat Indonesia

Kawasan Barat Indonesia dalam penelitian ini meliputi Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali.

2. Kawasan Timur Indonesia

Kawasan Timur Indonesia dalam penelitian ini meliputi Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua.

3. Ketimpangan wilayah

Ketimpangan wilayah adalah kondisi ketidakmerataan pembangunan antarwilayah. Indikator ketimpangan wilayah di Kawasan Barat Indonesia diukur menggunakan indeks Theil, sedangkan di Kawasan Timur Indonesia diukur menggunakan indeks Williamson menurut provinsi tahun 2012-2016.

4. Tenaga kerja

Tenaga kerja adalah penduduk yang memasuki usia kerja, yaitu penduduk yang berusia 15 tahun dan lebih (Badan Pusat Statistik, 2017c:80). Tenaga kerja dalam penelitian ini menggunakan persentase tenaga kerja yang bekerja

terhadap total tenaga kerja menurut provinsi di Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia tahun 2012-2016.

5. Penanaman Modal

Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia (UU RI No. 25 Tahun 2007). Penanaman modal dalam penelitian ini menggunakan logaritma natural realisasi penanaman modal (asing dan dalam negeri) menurut provinsi di Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia tahun 2012-2016.

6. Teknologi informasi dan komunikasi

Indikator TIK yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) yang disusun berdasarkan 11 indikator, yaitu pengguna telepon tetap per 100 penduduk, pengguna telepon seluler per 100 penduduk, *bandwith internet internasional* per pengguna, persentase rumah tangga yang menguasai komputer, persentase rumah tangga yang memiliki akses internet, persentase pengguna internet, pelanggan internet *broadband* tetap per 100 penduduk, pelanggan internet *broadband* bergerak per 100 penduduk, angka melek huruf, angka partisipasi kasar sekunder, dan angka partisipasi kasar tersier (Badan Pusat Statistik, 2016).

7. Aglomerasi

Aglomerasi merupakan konsentrasi ekonomi yang diukur menggunakan indeks Balassa. Formulasi indeks Balassa, yaitu:

$$IB = \frac{PDRB_i^s}{PDRB^s} / \frac{PDRB_i}{PDRB}$$

Keterangan

IB : indeks Balassa

$PDRB_i^s$: PDRB sektor industri manufaktur wilayah i

$PDRB^s$: PDRB sektor industri manufaktur seluruh wilayah

$PDRB_i$: total PDRB wilayah i

PDRB : total PDRB seluruh wilayah

BAB 5. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai ketimpangan pembangunan antara Kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Selama tahun 2012-2016, masih terjadi ketimpangan di Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia yang dibuktikan dengan hasil perhitungan indeks Theil dan indeks Willimson, yaitu sebesar 0,3367 dan 0,6553 untuk Kawasan Barat Indonesia dan untuk Kawasan Timur Indonesia sebesar 0,4075 dan 0,8467. Ketimpangan di Kawasan Barat Indonesia cenderung mengalami peningkatan dan berada pada kategori ketimpangan sedang, sedangkan ketimpangan di Kawasan Timur Indonesia cenderung menurun dan berada pada kategori ketimpangan yang tinggi. Ketimpangan di Kawasan Barat Indonesia dikontribusi oleh ketimpangan antarprovinsi sebesar 50,91 persen dan ketimpangan intra provinsi sebesar 49,09 persen, sedangkan ketimpangan di Kawasan Timur Indonesia dikontribusi oleh ketimpangan antarprovinsi sebesar 54,45 persen dan ketimpangan intra provinsi sebesar 45,55 persen.
2. Berdasarkan hasil regresi, model yang tepat untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan wilayah di Kawasan Barat Indonesia adalah model *fixed effect*. Dari analisis tersebut diperoleh hasil bahwa tenaga kerja dan aglomerasi mempunyai pengaruh terhadap ketimpangan wilayah di Kawasan Barat Indonesia, yang ditunjukkan dengan nilai t-statistik lebih besar dari t-tabel dan probabilitas t-statistik kurang dari taraf signifikansi ($\alpha=5\%$). Tenaga kerja dan aglomerasi mempunyai hubungan yang positif terhadap ketimpangan wilayah di Kawasan Barat Indonesia. Sementara itu, penanaman modal dan teknologi informasi dan komunikasi tidak mempunyai pengaruh terhadap ketimpangan wilayah di Kawasan Barat Indonesia.
3. Berdasarkan hasil regresi, model yang tepat untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan wilayah di Kawasan Timur Indonesia

adalah model *random effect*. Dari analisis tersebut diperoleh hasil bahwa penanaman modal dan aglomerasi mempunyai pengaruh terhadap ketimpangan wilayah di Kawasan Timur Indonesia, yang ditunjukkan dengan nilai t-statistik lebih besar dari t-tabel atau probabilitas t-statistik kurang dari taraf signifikansi ($\alpha=5\%$), sedangkan tenaga kerja dan teknologi informasi dan komunikasi tidak mempunyai pengaruh terhadap ketimpangan wilayah di Kawasan Timur Indonesia. Aglomerasi mempunyai hubungan yang positif terhadap ketimpangan wilayah di Kawasan Timur Indonesia, artinya konsentrasi ekonomi antardaerah yang cukup tinggi dapat mendorong meningkatnya ketimpangan. Sementara itu, penanaman modal mempunyai hubungan negatif dengan ketimpangan wilayah di Kawasan Timur Indonesia, artinya alokasi investasi yang masuk ke suatu daerah dapat berdampak pada pengurangan ketimpangan.

5.2 Saran

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional, yaitu pembangunan yang merata dan berkeadilan, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) tahun 2005-2025 dapat dilakukan melalui:

1. Diperlukan upaya nyata dan *grand strategy* dari pemerintah untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah, seperti melalui pengembangan potensi wilayah dan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru sehingga dapat memperkecil pengaruh polarisasi.
2. Perlunya peningkatan kemampuan sumber daya manusia agar mampu mengelola dan mengembangkan potensi wilayah, melalui perbaikan gizi, pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, dan lain-lain.
3. Pengoptimalan pelaksanaan investasi, khususnya di Kawasan Timur Indonesia guna mendorong pertumbuhan wilayah dan menciptakan kesempatan kerja melalui peningkatan iklim investasi yang kondusif bagi investor, peningkatan dan penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, melakukan

deregulasi terhadap beberapa peraturan yang dapat menghambat pelaksanaan investasi.

4. Perbaikan dan peningkatan infrastruktur, khususnya infrastruktur dasar di Kawasan Timur Indonesia agar tercipta konektivitas nasional, baik secara domestik maupun secara internasional, untuk memperlancar penyebaran hasil-hasil pertumbuhan dari pusat pertumbuhan wilayah ke daerah sekitarnya (*trickling down effect*) dan menurunkan biaya logistik yang berujung pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan kesejahteraan.
5. Perlunya pemerataan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi di seluruh wilayah NKRI, dengan mempertimbangkan fakta bahwa penyelenggaraan telekomunikasi cenderung lebih cepat di Pulau Jawa dibandingkan wilayah lainnya, mewujudkan akses atau layanan TIK yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia, dimana penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai arti strategis dalam upaya memperlancar kegiatan pemerintah (pusat ke daerah), mendukung terciptanya pemerataan pembangunan, dan meningkatkan hubungan antarbangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adifa, Yunus. 2007. Analisis Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah Pembangunan di Kabupaten Alor. *Tesis*. Bogor: Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Adisasmita, H. R. 2005. *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Akai, Nobuo, Sakata, Masayo. 2005. Fiscal Decentralization, Commitment, and Regional Inequality: Evidence from State-level Cross-sectional Data for the United State. *CIRJE-F-315*.
- Angelia, Yuki. 2010. Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 1995-2008. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Antonelli, C. 1991. *The diffusion of advanced telecommunications in developing countries*. Paris: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).
- Arsyad, Lincoln. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Keempat. Yogyakarta: PB STIE YKPN.
- Badan Pusat Statistik. 2017a. *Berita Resmi Statistik*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2017b. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha 2012-2016*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2017c. *Statistik Indonesia 2017*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2016a. *Berita Resmi Statistik*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2016b. *Statistik Indonesia 2016*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2016c. *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2016*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2015a. *Statistik Indonesia 2015*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2015b. *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2015*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

- Badan Pusat Statistik. 2014a. *Statistik Indonesia 2014*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2014b. *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2014*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2013a. *Statistik Indonesia 2013*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2013b. *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2013*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2012. *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2012*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bakri, Syafrizal, Aimon, Hasdi. 2016. Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dan Kebijakan Penanggulangannya. *Jurnal. Universitas Negeri Padang*.
- Barika. 2012. Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2009. *Jurnal Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan*. 4 (3) : 1-11.
- Basuki, Agus Tri. 2014. *Regresi Model PAM, ECM dan Data Panel dengan Eviews 7*. Yogyakarta.
- Bing, Shen. 2004. *China's Regional Disparity in 1981-2000: Openness and Development of Non-State-Owned Enterprises and Fiscal Decentralization*. *Chinese Geographical Science*. 14 (2) : 97-103.
- Dawkins, Casey J. 2003. Regional Development Theory: Conceptual Foudation, Classic Works, and Recent Developments. *Journal of Planning Literatur*. 18 (2).
- Deliarinov. 2014. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Edisi Ketiga*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Edquist, H. 2005. *The Swedish ICT miracle-Myth or reality?*. *Information Economics and Policy*. 17 (3) : 275-301.
- Farhadi M., Ismail R., Fooladi M. 2012. *Information and Communication Technology Use and Economic Growth*. *PloS ONE* 7(11): e48903. Doi:10.1371/journal.pone.0048903.

- Firdaus, Muhammad. 2013. Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah di Indonesia: Fakta dan Strategi Inisiatif. *Orasi Ilmiah*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Fithrian, Masri, Syechalad, Nur, Nasir, Muhammad. 2015. Analisis Pengaruh *Aggregat Demand* dan Tingkat Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Aceh. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. 3 (3) : 23-32.
- Ginting, Ari M. 2014. Analisis Ketimpangan Pembangunan di Indonesia. *RPSEP*-26.
- Gujarati, Damodar dan Dawn C.P. 2011. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Edisi Lima. Buku 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Hakim, M. Lukmanul. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesenjangan Pendapatan di Wilayah Tapal Kuda Provinsi Jawa Timur Tahun 2001-2011. *Skripsi*. Jember: Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Hartono, Budiantoro. 2008. Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. *Tesis*. Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Iscan, Erhan. 2012. *The Impact of Information and Communication Technology on Economic Growth: Turkish Case*. *International Journal of eBusiness And eGovernment*. ISSN: 2146-0744.
- Jhingan, M.L. 2012. *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kim, Euijune, Hong, Sung Woong, dan Ha, Soo Jung. 2003. *Impact of national development and decentralization policies on regional income disparity in Korea*. *Ann Reg Sci*. 37: 79-91.
- Kuncoro, Mudrajad. 2012. *Perencanaan Daerah: Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota, dan Kawasan?*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kurniawan, Benecditus Riandoko Adi, Sugiyanto, FX. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, *Share* Sektor Industri dan Pertanian serta Tingkat Jumlah Orang yang Bekerja Terhadap Ketimpangan Wilayah Antar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2002-2010. *Diponegoro Journal of Economics*. 2(1) : 1-14.
- Lee, ST, Gholami, R., Tong, TY. 2005. *Time series analysis in the assessment of ICT impact at the aggregate level-Lesson and implication for the new economy*. *Information and Management*. 42: 1009-1022.

- Mahyudi, Ahmad. 2004. *Ekonomi Pembangunan dan Analisis Data Empiris*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 26 Tahun 2008. *Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional*. 10 Maret 2008. Jakarta.
- Pradnyadewi, Diah, Purbadharmadja, Ida Bagus Putu. 2017. Pengaruh IPM, Biaya Infrastruktur, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Bali. *Jurnal. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*.
- Prijambodo, Bambang. 1995. *Teori Pertumbuhan Endogen: Tinjauan Teoritis Singkat dan Implikasi Kebijaksanaannya*. Jakarta: Bappenas.
- Quibria, M.G. dan Tschang, Ted. 2001. *Information and Communication Technology and Poverty : An Asian Perspective. Institute Working Paper 12*. Asian Development Bank Institute Tokyo. (Online). <http://www.adbi.org> . Desember 2012.
- Rosmeli. 2015. Dampak Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Ketimpangan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia. *Jurnal Paradigma Ekonomika*. 10 (2) : 362-269.
- Rosmeli, Nurhayani. 2014. Studi Komperatif Ketimpangan Wilayah antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia. *Jurnal*. Jambi: Universitas Jambi.
- Ruslin, Isma Tita. 2012. Relasi Ekonomi-Politik Dalam Perspektif *Dependencia*. *Sulesana*. 7 (2) : 114-126.
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Padang: Badouse Media.
- Sodik, Jamzani, Nuryadin, Didi. 2012. Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Regional (Studi Kasus Pada 26 Provinsi di Indonesia, Pra dan Pasca Otonomi. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 10 (2) : 157-170.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 2014. *Statistik Penduduk 1971-2015*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Tarigan, Robinson. 2005. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Terranova, Faradha Raissa. 2016. Pengaruh Teknologi Informasi Komunikasi dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus 5 Negara Anggota ASEAN. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Airlangga.

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 25 Tahun 2007. *Penanaman Modal*. 26 April 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 17 Tahun 2007. *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025*. 5 Februari 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 25 Tahun 2004. *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. 5 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 13 Tahun 2003. *Ketenagakerjaan*. 25 Maret 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Jakarta.

Zaidun, Muchammad. 2008. *Paradigma Baru Kebijakan Hukum Investasi Indonesia Suatu Tantangan dan Harapan*. Surabaya: Universitas Airlangga.



LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Kawasan

No.	Wilayah	PDRB ADHK 2010 (Milyar Rupiah)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Aceh	108,915	111,756	113,488	112,661	116,387
2	Sumatera Utara	375,924	398,727	419,573	440,956	463,775
3	Sumatera Barat	118,722	125,942	133,341	140,705	148,112
4	Riau	425,626	436,188	447,987	448,992	458,998
5	Jambi	104,615	111,766	119,991	125,036	130,500
6	Sumatera Selatan	220,459	232,175	243,298	254,045	266,815
7	Bengkulu	32,363	34,326	36,207	38,066	40,083
8	Lampung	170,769	180,620	189,790	199,536	209,807
9	Kep. Bangka Belitung	40,105	42,191	44,159	45,961	47,853
10	Kep. Riau	128,035	137,264	146,325	155,113	162,923
11	DKI Jakarta	1,222,528	1,296,695	1,373,390	1,454,346	1,539,378
12	Jawa Barat	1,028,410	1,093,544	1,149,216	1,207,083	1,275,546
13	Jawa Tengah	691,343	726,655	764,959	806,775	849,384
14	DI Yogyakarta	71,702	75,627	79,536	83,474	87,688
15	Jawa Timur	1,124,465	1,192,790	1,262,685	1,331,395	1,405,236
16	Banten	310,386	331,099	349,351	368,217	387,595
17	Bali	106,951	114,104	121,788	129,131	137,193
Kawasan Barat Indonesia		6,281,318	6,641,468	6,995,085	7,341,493	7,727,273
1	Kalimantan Barat	96,162	101,980	107,115	112,325	118,185
2	Kalimantan Tengah	64,650	69,412	73,725	78,891	83,910
3	Kalimantan Selatan	96,698	101,851	106,779	110,868	115,728
4	Kalimantan Timur	469,646	438,533	446,029	440,648	438,977
5	Kalimantan Utara	-	44,092	47,696	49,316	51,165
6	Nusa Tenggara Barat	66,341	69,767	73,373	89,345	94,548
7	Nusa Tenggara Timur	48,863	51,505	54,108	56,832	59,776
8	Sulawesi Utara	58,678	62,422	66,361	70,425	74,771
9	Sulawesi Tengah	62,250	68,219	71,678	82,803	91,071
10	Sulawesi Selatan	202,185	217,589	233,988	250,758	269,339
11	Sulawesi Tenggara	59,785	64,269	68,292	72,991	77,740
12	Gorontalo	17,987	19,368	20,776	22,069	23,507
13	Sulawesi Barat	20,787	22,227	24,196	25,984	27,552
14	Maluku	21,000	22,101	23,568	24,859	26,291
15	Maluku Utara	17,120	18,209	19,209	20,381	21,556
16	Papua Barat	44,425	47,695	50,260	52,346	54,711
17	Papua	107,891	117,119	121,391	130,460	142,476
Kawasan Timur Indonesia		1,454,467	1,536,357	1,608,543	1,691,301	1,771,301

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017b.

Lampiran 1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kawasan

No.	Wilayah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Aceh	3.85	2.61	1.55	(0.73)	3.31
2	Sumatera Utara	6.45	6.07	5.23	5.10	5.18
3	Sumatera Barat	6.31	6.08	5.88	5.52	5.26
4	Riau	3.76	2.48	2.71	0.22	2.23
5	Jambi	7.03	6.84	7.36	4.20	4.37
6	Sumatera Selatan	6.83	5.31	4.79	4.42	5.03
7	Bengkulu	6.83	6.07	5.48	5.13	5.30
8	Lampung	6.44	5.77	5.08	5.13	5.15
9	Kep. Bangka Belitung	5.50	5.20	4.67	4.08	4.11
10	Kep. Riau	7.63	7.21	6.60	6.01	5.03
11	DKI Jakarta	6.53	6.07	5.91	5.89	5.85
12	Jawa Barat	6.50	6.33	5.09	5.04	5.67
13	Jawa Tengah	5.34	5.11	5.27	5.47	5.28
14	DI Yogyakarta	5.37	5.47	5.17	4.95	5.05
15	Jawa Timur	6.64	6.08	5.86	5.44	5.55
16	Banten	6.83	6.67	5.51	5.40	5.26
17	Bali	6.96	6.69	6.73	6.03	6.24
Kawasan Barat Indonesia		6.21	5.73	5.32	4.95	5.25
1	Kalimantan Barat	5.91	6.05	5.03	4.86	5.22
2	Kalimantan Tengah	6.87	7.37	6.21	7.01	6.36
3	Kalimantan Selatan	5.97	5.33	4.84	3.83	4.38
4	Kalimantan Timur	5.48	(6.62)	1.71	(1.21)	(0.38)
5	Kalimantan Utara	-	-	8.18	3.40	3.75
6	Nusa Tenggara Barat	(1.54)	5.16	5.17	21.77	5.82
7	Nusa Tenggara Timur	5.46	5.41	5.05	5.03	5.18
8	Sulawesi Utara	6.86	6.38	6.31	6.12	6.17
9	Sulawesi Tengah	9.53	9.59	5.07	15.52	9.98
10	Sulawesi Selatan	8.87	7.62	7.54	7.17	7.41
11	Sulawesi Tenggara	11.65	7.50	6.26	6.88	6.51
12	Gorontalo	7.91	7.67	7.27	6.22	6.52
13	Sulawesi Barat	9.25	6.93	8.86	7.39	6.03
14	Maluku	7.16	5.24	6.64	5.48	5.76
15	Maluku Utara	6.98	6.36	5.49	6.10	5.77
16	Papua Barat	3.63	7.36	5.38	4.15	4.52
17	Papua	1.72	8.55	3.65	7.47	9.21
Kawasan Timur Indonesia		5.95	5.63	4.70	5.14	4.73

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017b (data diolah).

Lampiran 1.3 PDRB per Kapita Menurut Kawasan

No.	Wilayah	PDRB per Kapita (Rupiah)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Aceh	23,099,130	23,228,590	23,129,040	22,523,410	22,837,730
2	Sumatera Utara	28,036,880	29,339,210	30,477,070	31,637,410	32,885,090
3	Sumatera Barat	23,744,010	24,857,640	25,982,830	27,077,950	28,160,460
4	Riau	72,396,340	72,297,050	72,390,880	70,769,780	70,604,540
5	Jambi	32,417,720	34,012,100	35,878,090	36,753,230	37,728,370
6	Sumatera Selatan	28,577,890	29,656,760	30,636,270	31,549,300	32,694,360
7	Bengkulu	18,143,510	18,919,300	19,626,720	20,302,480	21,043,160
8	Lampung	21,794,830	22,770,680	23,647,270	24,581,680	25,570,210
9	Kep. Bangka Belitung	31,172,420	32,081,300	32,859,640	33,479,770	34,135,950
10	Kep. Riau	70,930,000	73,743,330	76,313,810	78,616,070	80,329,850
11	DKI Jakarta	123,962,380	130,060,310	136,312,340	142,892,190	149,779,370
12	Jawa Barat	23,036,000	24,118,310	24,966,860	25,842,320	26,921,970
13	Jawa Tengah	20,950,620	21,844,870	22,819,160	23,887,370	24,967,850
14	DI Yogyakarta	20,183,880	21,037,700	21,867,900	22,688,350	23,566,250
15	Jawa Timur	29,508,400	31,092,040	32,703,390	34,272,290	35,962,400
16	Banten	27,716,470	28,910,660	29,846,640	30,799,590	31,761,920
17	Bali	26,689,580	28,129,670	29,668,900	31,094,580	32,664,350
Kawasan Barat Indonesia		31,881,003	33,277,065	34,612,594	35,887,555	37,330,748

Lanjutan Lampiran 1.3

No.	Wilayah	PDRB per Kapita (Rupiah)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kalimantan Barat	21,062,220	21,971,930	22,712,650	23,451,950	24,309,130
2	Kalimantan Tengah	27,749,010	29,106,400	30,216,730	31,619,180	32,903,200
3	Kalimantan Selatan	25,547,770	26,423,900	27,220,270	27,787,880	28,536,100
4	Kalimantan Timur	124,501,880	133,868,680	133,086,110	128,594,760	125,377,880
5	Kalimantan Utara	-	74,106,930	77,152,600	76,823,850	76,785,920
6	Nusa Tenggara Barat	14,276,690	14,809,840	15,369,940	18,476,510	19,310,680
7	Nusa Tenggara Timur	10,030,980	10,396,760	10,742,320	11,099,850	11,487,560
8	Sulawesi Utara	25,145,960	26,445,860	27,805,520	29,196,390	30,682,600
9	Sulawesi Tengah	22,724,470	24,490,980	25,316,270	28,784,200	31,170,240
10	Sulawesi Selatan	24,507,170	26,083,420	27,749,470	29,430,670	31,295,240
11	Sulawesi Tenggara	25,489,790	26,815,360	27,896,050	29,201,900	30,474,050
12	Gorontalo	16,650,270	17,639,120	18,622,440	19,473,940	20,427,410
13	Sulawesi Barat	17,169,060	18,008,810	19,232,050	20,265,500	21,087,430
14	Maluku	13,129,110	13,572,070	14,219,620	14,740,300	15,325,250
15	Maluku Utara	15,691,010	16,332,220	16,869,520	17,534,410	18,177,000
16	Papua Barat	55,047,840	57,581,360	59,142,590	60,064,130	61,242,010
17	Papua	36,280,030	38,621,360	39,271,880	41,424,060	44,420,530
Kawasan Timur Indonesia		30,050,127	31,203,160	32,127,245	33,232,895	34,254,358

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017b (data diolah).

Lampiran 1.4 Tenaga Kerja yang Bekerja Menurut Kawasan

No.	Wilayah	Tenaga Kerja yang Bekerja (orang)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Aceh	1,798,547	1,824,586	1,931,823	1,966,018	2,087,045
2	Sumatera Utara	5,751,682	5,899,560	5,881,371	5,962,304	5,991,229
3	Sumatera Barat	2,037,642	2,005,625	2,180,336	2,184,599	2,347,911
4	Riau	2,399,002	2,481,361	2,518,485	2,554,296	2,765,946
5	Jambi	1,423,624	1,382,471	1,491,038	1,550,403	1,624,522
6	Sumatera Selatan	3,532,932	3,464,620	3,692,806	3,695,866	3,998,637
7	Bengkulu	830,266	801,146	868,794	904,317	964,971
8	Lampung	3,449,307	3,385,046	3,673,158	3,635,258	3,931,321
9	Kep. Bangka Belitung	583,102	596,786	604,223	623,949	686,830
10	Kep. Riau	824,567	848,660	819,656	836,670	859,813
11	DKI Jakarta	4,838,596	4,712,836	4,634,369	4,724,029	4,861,832
12	Jawa Barat	18,321,108	18,413,984	19,230,943	18,791,482	19,202,038
13	Jawa Tengah	16,132,890	15,964,048	16,550,682	16,435,142	16,511,136
14	DI Yogyakarta	1,867,708	1,847,070	1,956,043	1,891,218	2,042,400
15	Jawa Timur	19,081,995	19,266,457	19,306,508	19,367,777	19,114,563
16	Banten	4,605,847	4,637,019	4,853,992	4,825,460	5,088,497
17	Bali	2,268,708	2,273,897	2,272,632	2,324,805	2,416,555
Kawasan Barat Indonesia		89,747,523	89,805,172	92,466,859	92,273,593	94,495,246

Lanjutan Lampiran 1.4

No.	Wilayah	Jumlah Penduduk yang Bekerja				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kalimantan Barat	2,106,514	2,053,823	2,226,510	2,235,887	2,287,823
2	Kalimantan Tengah	1,070,210	1,063,711	1,154,489	1,214,681	1,248,189
3	Kalimantan Selatan	1,821,327	1,811,096	1,867,462	1,889,502	1,965,088
4	Kalimantan Timur	1,619,118	1,624,272	1,677,466	1,423,957	1,581,239
5	Kalimantan Utara	0	0	0	267,023	273,423
6	Nusa Tenggara Barat	1,978,764	1,981,842	2,094,100	2,127,503	2,367,310
7	Nusa Tenggara Timur	2,095,683	2,075,948	2,174,228	2,219,291	2,277,068
8	Sulawesi Utara	957,292	946,852	980,756	1,000,032	1,110,564
9	Sulawesi Tengah	1,165,442	1,175,930	1,293,226	1,327,418	1,459,803
10	Sulawesi Selatan	3,351,908	3,291,280	3,527,036	3,485,492	3,694,712
11	Sulawesi Tenggara	975,879	968,949	1,037,419	1,074,916	1,219,548
12	Gorontalo	445,729	449,104	479,137	493,687	546,668
13	Sulawesi Barat	548,783	523,960	595,797	595,905	624,182
14	Maluku	610,362	598,792	601,651	655,063	690,786
15	Maluku Utara	443,946	445,359	456,017	482,543	503,479
16	Papua Barat	341,741	353,619	378,436	380,226	402,360
17	Papua	1,527,933	1,634,332	1,617,437	1,672,480	1,664,485
Kawasan Timur Indonesia		21,060,631	20,998,869	22,161,167	22,545,606	23,916,727

Sumber: data tahun 2012, Badan Pusat Statistik (2013a); data tahun 2013, Badan Pusat Statistik (2014a); data tahun 2014, Badan Pusat Statistik (2015a); data tahun 2015, Badan Pusat Statistik (2016b); data tahun 2016, Badan Pusat Statistik (2017c)

Lampiran 1.5 Persentase Tenaga Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

No.	Wilayah	SD, SMP					SMA/SMK, Diploma, Universitas				
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	Aceh	50.30	45.01	48.28	44.54	42.05	46.37	42.79	49.73	54.56	55.83
2	Sumatera Utara	49.37	47.58	46.67	44.45	44.19	43.84	41.31	47.73	52.10	50.61
3	Sumatera Barat	44.36	42.90	43.84	42.61	39.47	41.97	38.75	43.26	46.97	48.36
4	Riau	47.83	46.38	48.40	45.13	44.44	41.77	221.48	44.59	48.98	50.64
5	Jambi	49.25	45.90	49.35	49.43	49.55	34.35	35.81	37.73	38.75	41.09
6	Sumatera Selatan	50.85	47.49	50.09	52.28	48.68	34.28	33.16	36.19	37.35	39.60
7	Bengkulu	44.87	43.15	45.54	45.49	43.06	38.74	38.22	40.81	42.80	46.40
8	Lampung	51.80	51.12	54.12	55.82	53.37	32.64	31.12	33.52	33.67	33.73
9	Kep. Bangka Belitung	44.47	44.04	44.63	45.78	46.45	35.46	33.70	37.34	40.96	39.44
10	Kep. Riau	31.51	30.65	33.74	31.90	32.83	62.19	59.11	64.34	65.39	64.65
11	DKI Jakarta	36.00	30.41	33.10	28.61	28.69	69.41	65.30	71.04	73.26	72.42
12	Jawa Barat	60.33	53.50	56.82	53.69	52.68	34.78	32.64	38.31	43.39	45.89
13	Jawa Tengah	55.38	53.14	54.92	54.00	54.32	27.50	26.36	29.26	31.38	31.74
14	DI Yogyakarta	38.25	36.09	37.49	37.48	36.35	49.29	47.47	51.29	53.13	53.09
15	Jawa Timur	50.74	48.58	49.03	48.48	48.61	29.60	28.55	32.09	35.50	38.51
16	Banten	49.59	44.05	45.71	44.11	45.29	46.66	42.35	49.14	53.03	243.38
17	Bali	37.79	35.99	36.00	36.20	33.97	45.87	46.29	48.09	47.17	51.14
Kawasan Barat Indonesia		46.63	43.88	45.75	44.71	43.76	42.04	50.85	44.38	46.96	59.21

Lanjutan Lampiran 1.5

No.	Wilayah	SD, SMP					SMA/SMK, Diploma, Universitas				
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	Kalimantan Barat	47.14	46.82	47.73	48.91	46.34	26.33	26.04	28.90	31.54	32.53
2	Kalimantan Tengah	55.97	54.63	53.30	52.93	54.28	29.86	30.61	33.16	36.39	37.91
3	Kalimantan Selatan	54.03	51.23	52.41	205.31	48.65	29.94	29.06	32.25	36.93	38.03
4	Kalimantan Timur	44.90	38.84	42.33	38.36	41.79	51.28	48.21	52.00	59.94	58.53
5	Kalimantan Utara	0.00	0.00	0.00	41.26	43.89	0.00	0.00	0.00	50.28	47.83
6	Nusa Tenggara Barat	41.06	38.44	40.75	40.86	38.78	30.63	29.10	33.88	37.27	39.91
7	Nusa Tenggara Timur	47.64	47.54	49.15	47.52	44.74	23.61	23.59	27.25	29.72	33.28
8	Sulawesi Utara	45.59	42.09	44.74	44.76	43.33	48.54	44.08	49.93	51.76	48.91
9	Sulawesi Tengah	51.20	48.94	49.96	50.60	49.27	35.39	34.94	35.60	37.89	38.81
10	Sulawesi Selatan	43.13	39.63	41.87	40.49	41.73	39.69	38.39	41.40	44.14	42.44
11	Sulawesi Tenggara	43.32	41.32	43.88	42.84	38.38	39.39	39.12	42.69	43.59	46.75
12	Gorontalo	44.71	41.66	44.03	42.62	42.47	27.51	27.77	28.35	34.95	38.21
13	Sulawesi Barat	43.59	41.60	43.57	46.01	44.29	28.10	29.42	29.28	32.13	31.67
14	Maluku	49.69	44.47	47.32	43.51	41.07	45.11	42.92	52.39	54.22	56.49
15	Maluku Utara	50.17	46.46	49.14	46.70	45.39	37.36	38.05	43.19	45.80	47.93
16	Papua Barat	38.92	37.15	36.70	38.40	37.95	43.80	42.37	46.55	51.58	54.80
17	Papua	28.41	27.23	32.17	30.76	30.71	26.25	24.00	24.63	26.30	32.20
Kawasan Timur Indonesia		42.91	40.47	42.30	53.05	43.12	33.10	32.22	35.38	41.44	42.72

Sumber: data tahun 2012, Badan Pusat Statistik (2012); data tahun 2013, Badan Pusat Statistik (2013b); data tahun 2014, Badan Pusat Statistik (2014b); data tahun 2015, Badan Pusat Statistik (2015b); data tahun 2016, Badan Pusat Statistik (2016c).

Lampiran 1.6 Realisasi Penanaman Modal Menurut Kawasan (Milyar Rupiah)

No.	Provinsi KBI	PMDN					PMA				
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	Aceh	60	3,636	5,110	4,192	2,456	1,666	1,148	387	292	1,807
2	Sumatera Utara	2,550	5,069	4,224	4,287	4,864	6,240	10,818	6,852	17,190	13,634
3	Sumatera Barat	885	678	421	1,553	3,796	725	1,114	1,395	788	1,065
4	Riau	5,450	4,874	7,708	9,943	6,614	11,149	15,905	17,037	9,014	11,677
5	Jambi	1,446	2,800	908	3,540	3,884	1,511	418	639	1,486	820
6	Sumatera Selatan	2,931	3,396	7,043	10,944	8,534	7,604	5,923	13,143	8,909	37,533
7	Bengkulu	53	110	8	554	949	294	272	240	284	748
8	Lampung	304	1,325	3,496	1,102	6,032	1,105	570	1,947	3,555	1,151
9	Kep. Bangka Belitung	534	608	616	1,024	2,202	572	1,370	1,306	1,141	708
10	Kep. Riau	44	418	29	612	493	5,194	3,848	4,878	8,834	6,975
11	DKI Jakarta	8,540	5,755	17,812	15,513	12,217	39,721	31,583	56,097	49,930	45,658
12	Jawa Barat	11,384	9,006	18,727	26,273	30,360	40,717	86,845	81,631	79,165	73,507
13	Jawa Tengah	5,797	12,594	13,602	15,411	24,070	2,335	5,659	5,765	11,731	13,850
14	DI Yogyakarta	334	284	704	362	949	821	361	807	1,229	263
15	Jawa Timur	21,520	34,849	38,132	35,490	46,332	22,229	41,398	22,423	35,776	26,079
16	Banten	5,118	4,009	8,081	10,710	12,426	26,267	45,346	25,310	35,067	39,127
17	Bali	3,108	2,985	253	1,250	482	4,661	4,765	5,313	6,840	6,054
Kawasan Barat Indonesia		70,057	92,394	126,871	142,760	166,660	172,814	257,343	245,170	271,230	280,658

Sumber: data 2012-2013, Badan Pusat Statistik (2014a); data 2014-2016, Badan Pusat Statistik (2017c).

Lanjutan Lampiran 1.6

No.	Provinsi KBI	PMA + PMDN				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Aceh	1,726	4,785	5,497	4,485	4,263
2	Sumatera Utara	8,790	15,887	11,076	21,477	18,498
3	Sumatera Barat	1,611	1,792	1,816	2,340	4,861
4	Riau	16,599	20,780	24,744	18,957	18,291
5	Jambi	2,957	3,218	1,547	5,026	4,704
6	Sumatera Selatan	10,535	9,319	20,186	19,853	46,068
7	Bengkulu	347	381	248	838	1,697
8	Lampung	1,409	1,896	5,443	4,657	7,183
9	Kep. Bangka Belitung	1,106	1,978	1,922	2,165	2,910
10	Kep. Riau	5,237	4,266	4,906	9,446	7,467
11	DKI Jakarta	48,262	37,337	73,908	65,442	57,875
12	Jawa Barat	52,101	95,852	100,358	105,438	103,867
13	Jawa Tengah	8,132	18,253	19,366	27,142	37,920
14	DI Yogyakarta	1,155	645	1,511	1,592	1,212
15	Jawa Timur	43,750	76,246	60,555	71,266	72,411
16	Banten	31,384	49,354	33,392	45,777	51,553
17	Bali	7,769	7,749	5,566	8,090	6,537
Kawasan Barat Indonesia		242,871	349,737	372,041	413,991	447,318

Lanjutan Lampiran 1.6

No.	Wilayah	PMDN					PMA				
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	Kalimantan Barat	2,811	2,522	4,321	6,144	9,016	3,844	7,923	12,018	18,426	8,474
2	Kalimantan Tengah	4,530	1,835	980	1,270	8,179	5,074	5,870	11,830	12,879	5,485
3	Kalimantan Selatan	3,510	8,299	2,617	2,060	6,163	2,633	3,176	6,251	13,260	3,351
4	Kalimantan Timur	5,889	16,035	12,859	9,611	6,885	19,476	16,277	26,693	32,851	15,312
5	Kalimantan Utara		22	643	922	3,346	-	559	1,347	3,185	2,161
6	Nusa Tenggara Barat	45	1,398	213	348	1,343	6,148	5,951	188	964	782
7	Nusa Tenggara Timur	14	18	4	1,296	822	84	121	6,856	9,648	5,898
8	Sulawesi Utara	679	67	83	271	5,070	452	801	1,224	1,214	5,143
9	Sulawesi Tengah	603	605	96	968	1,081	7,799	10,422	18,588	14,970	21,502
10	Sulawesi Selatan	2,319	921	4,950	9,215	3,335	5,634	5,641	3,494	3,218	5,005
11	Sulawesi Tenggara	907	1,262	1,250	2,015	1,794	345	1,053	2,013	2,000	5,053
12	Gorontalo	165	84	45	94	2,203	341	313	51	95	171
13	Sulawesi Barat	229	685	690	1,104	84	2	30	203	28	277
14	Maluku	3	-	-	-	11	82	644	163	1,137	1,379
15	Maluku Utara	321	1,115	156	48	9	873	3,273	1,228	2,811	5,897
16	Papua Barat	46	304	100	63	11	309	661	1,908	3,567	6,913
17	Papua	55	584	250	1,275	221	11,627	28,766	15,682	12,374	15,699
Kawasan Timur Indonesia		22,125	35,757	29,255	36,705	49,571	64,724	91,481	109,737	132,629	108,500

Sumber: data 2012-2013, Badan Pusat Statistik (2014a); data 2014-2016, Badan Pusat Statistik (2017c).

Lanjutan Lampiran 1.6

No.	Wilayah	PMA + PMDN				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kalimantan Barat	6,655	10,445	16,339	24,569	17,490
2	Kalimantan Tengah	9,603	7,706	12,811	14,149	13,664
3	Kalimantan Selatan	6,143	11,476	8,868	15,320	9,514
4	Kalimantan Timur	25,366	32,312	39,552	42,463	22,197
5	Kalimantan Utara	-	582	1,990	4,107	5,506
6	Nusa Tenggara Barat	6,194	7,349	400	1,312	2,125
7	Nusa Tenggara Timur	99	138	6,859	10,944	6,721
8	Sulawesi Utara	1,130	868	1,307	1,485	10,213
9	Sulawesi Tengah	8,402	11,027	18,684	15,939	22,583
10	Sulawesi Selatan	7,953	6,562	8,444	12,434	8,340
11	Sulawesi Tenggara	1,253	2,315	3,263	4,016	6,847
12	Gorontalo	506	398	96	189	2,373
13	Sulawesi Barat	231	716	893	1,131	361
14	Maluku	86	644	163	1,137	1,390
15	Maluku Utara	1,194	4,388	1,384	2,860	5,906
16	Papua Barat	355	965	2,008	3,631	6,923
17	Papua	11,682	29,350	15,932	13,649	15,919
Kawasan Timur Indonesia		86,849	127,237	138,992	169,334	158,071

Lampiran 1.7 IP-TIK Menurut Kawasan

No.	Wilayah	IP-TIK				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Aceh	3.56	3.87	3.92	4.14	3.41
2	Sumatera Utara	4.51	4.11	4.09	4.29	3.69
3	Sumatera Barat	3.93	4.44	4.40	4.69	4.24
4	Riau	3.77	4.39	4.49	4.65	4.26
5	Jambi	3.69	4.23	4.22	4.50	3.92
6	Sumatera Selatan	4.17	4.03	4.17	4.27	3.80
7	Bengkulu	3.71	4.26	4.38	4.70	3.93
8	Lampung	3.35	3.62	3.67	3.76	3.32
9	Kep. Bangka Belitung	3.67	4.09	4.13	4.51	4.00
10	Kep. Riau	5.03	6.46	6.30	6.49	5.59
11	DKI Jakarta	9.05	8.78	9.23	9.25	7.41
12	Jawa Barat	4.31	4.64	4.82	5.03	4.51
13	Jawa Tengah	3.98	4.14	4.17	4.41	4.08
14	DI Yogyakarta	5.09	6.21	6.05	6.45	6.12
15	Jawa Timur	4.01	4.33	4.39	4.74	4.27
16	Banten	4.47	4.9	5.14	5.35	4.82
17	Bali	4.67	5.5	5.59	6.01	5.63
Kawasan Barat Indonesia		4.41	4.82	4.89	5.13	4.53
1	Kalimantan Barat	3.34	3.71	3.85	4.08	3.58
2	Kalimantan Tengah	3.65	4.18	4.23	4.57	4.12
3	Kalimantan Selatan	5.40	4.58	4.55	4.84	4.41
4	Kalimantan Timur	4.83	5.63	5.77	6.30	5.84
5	Kalimantan Utara	0.00	0.00	0.00	5.83	4.95
6	Nusa Tenggara Barat	3.09	3.36	3.53	3.67	3.29
7	Nusa Tenggara Timur	2.83	3.11	3.20	3.26	2.75
8	Sulawesi Utara	4.06	4.65	4.70	5.04	4.64
9	Sulawesi Tengah	3.36	3.8	3.78	3.98	3.51
10	Sulawesi Selatan	4.17	4.04	4.17	4.53	4.26
11	Sulawesi Tenggara	3.49	3.71	3.88	4.04	3.91
12	Gorontalo	3.47	3.73	3.75	3.81	3.72
13	Sulawesi Barat	3.00	3.59	3.75	3.33	3.02
14	Maluku	3.50	3.78	3.79	4.09	3.83
15	Maluku Utara	3.15	3.35	3.55	3.75	3.21
16	Papua Barat	3.67	4.01	4.06	4.32	3.73
17	Papua	3.59	2.71	2.78	2.91	2.41
Kawasan Timur Indonesia		3.45	3.64	3.73	4.26	3.83

Sumber: data 2012-2015, Badan Pusat Statistik (2016a); data 2016, Badan Pusat Statistik (2017a)

Lampiran 1.8 Indeks Balassa Menurut Kawasan

No.	Kawasan Barat Indonesia	Indeks Spesialisasi Industri				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Aceh	0.35475	0.32852	0.29824	0.23949	0.21984
2	Sumatera Utara	0.85175	0.84020	0.82121	0.81210	0.81159
3	Sumatera Barat	0.47999	0.47459	0.47096	0.45587	0.45699
4	Riau	1.05995	1.10390	1.13368	1.17560	1.21012
5	Jambi	0.47841	0.48337	0.47119	0.46408	0.45754
6	Sumatera Selatan	0.77456	0.76402	0.76128	0.77073	0.78420
7	Bengkulu	0.25594	0.25869	0.26054	0.26022	0.26287
8	Lampung	0.72339	0.73535	0.73028	0.74875	0.74424
9	Kep. Bangka Belitung	1.01767	0.99867	0.96469	0.94138	0.93299
10	Kep. Riau	1.59810	1.60917	1.59701	1.59571	1.57965
11	DKI Jakarta	0.54482	0.53998	0.53691	0.53435	0.52634
12	Jawa Barat	1.80390	1.81465	1.81343	1.80750	1.80273
13	Jawa Tengah	1.45424	1.45597	1.47231	1.46738	1.45950
14	DI Yogyakarta	0.54778	0.55389	0.54600	0.53290	0.53618
15	Jawa Timur	1.20932	1.20425	1.22304	1.22881	1.22406
16	Banten	1.59384	1.60756	1.54713	1.52285	1.49976
17	Bali	0.27115	0.27541	0.28055	0.28429	0.27797
No.	Kawasan Timur Indonesia	Indeks Spesialisasi Industri				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kalimantan Barat	0.70410	0.70513	0.69879	0.69154	0.69058
2	Kalimantan Tengah	0.59814	0.59916	0.63261	0.63140	0.64183
3	Kalimantan Selatan	0.54419	0.53454	0.52726	0.52706	0.54055
4	Kalimantan Timur	0.81326	0.81653	0.80525	0.83918	0.89365
5	Kalimantan Utara	0.00000	0.39804	0.38778	0.39922	0.41140
6	Nusa Tenggara Barat	0.21427	0.21075	0.20683	0.17566	0.17587
7	Nusa Tenggara Timur	0.05302	0.05264	0.05172	0.05196	0.05217
8	Sulawesi Utara	0.46551	0.45932	0.44617	0.43300	0.41482
9	Sulawesi Tengah	0.25333	0.24093	0.24734	0.40794	0.50416
10	Sulawesi Selatan	0.57576	0.58313	0.59018	0.58986	0.59749
11	Sulawesi Tenggara	0.25551	0.24720	0.25028	0.25301	0.26024
12	Gorontalo	0.17059	0.17073	0.16846	0.16647	0.16756
13	Sulawesi Barat	0.36783	0.36761	0.45753	0.47492	0.43552
14	Maluku	0.22224	0.22295	0.22634	0.22363	0.22768
15	Maluku Utara	0.21848	0.21828	0.22769	0.22364	0.24490
16	Papua Barat	1.35872	1.36990	1.34920	1.32680	1.31887
17	Papua	0.08687	0.08156	0.08543	0.08273	0.07964

Lampiran 4.1 Indeks Williamson Menurut Kawasan

Tahun	Kawasan Barat Indonesia	Kawasan Timur Indonesia	Indonesia
2012	0.64829	1.02417	0.75638
2013	0.64972	0.86406	0.70897
2014	0.65360	0.83400	0.70713
2015	0.65976	0.77647	0.70170
2016	0.66491	0.73485	0.70008

Lampiran 4.2 Indeks Williamson Menurut Provinsi

No.	Kawasan Barat Indonesia	2012	2013	2014	2015	2016
1	Aceh	0.45370	0.43705	0.41272	0.38605	0.38994
2	Sumatera Utara	0.55425	0.55216	0.55209	0.55505	0.56130
3	Sumatera Barat	0.25436	0.25469	0.25507	0.25667	0.25896
4	Riau	0.52505	0.48066	0.43702	0.41917	0.39174
5	Jambi	0.51307	0.50265	0.49522	0.48397	0.47018
6	Sumatera Selatan	0.87629	0.87204	0.70582	0.70542	0.70328
7	Bengkulu	0.39602	0.39622	0.39025	0.38847	0.38783
8	Lampung	0.25913	0.25935	0.25979	0.26013	0.26188
9	Kep. Bangka Belitung	0.18210	0.18400	0.18610	0.19047	0.19273
10	Kep. Riau	0.54927	0.56158	0.56484	0.56868	0.57089
11	DKI Jakarta	0.49047	0.49186	0.49603	0.50301	0.50914
12	Jawa Barat	0.71133	0.71454	0.71274	0.70630	0.70185
13	Jawa Tengah	0.67889	0.66978	0.66605	0.66198	0.65224
14	DI Yogyakarta	0.47892	0.47951	0.48120	0.48193	0.48202
15	Jawa Timur	0.94502	0.94677	0.95437	0.95714	0.95809
16	Banten	0.10391	0.10250	0.10035	0.10017	0.10067
17	Bali	0.28658	0.27933	0.27325	0.26743	0.27364

Lanjutan Lampiran 4.2

No.	Kawasan Timur Indonesia	2012	2013	2014	2015	2016
1	Kalimantan Barat	0.26599	0.27165	0.26834	0.26815	0.26880
2	Kalimantan Tengah	0.22087	0.21751	0.32282	0.20405	0.19833
3	Kalimantan Selatan	0.48752	0.48509	0.48056	0.46865	0.45821
4	Kalimantan Timur	0.57655	0.55245	0.53110	0.52156	0.50963
5	Kalimantan Utara	0.00000	0.25521	0.23816	0.21821	0.19620
6	Nusa Tenggara Barat	0.67903	0.66625	0.63272	0.93095	0.93497
7	Nusa Tenggara Timur	0.66777	0.62946	0.63639	0.64370	0.65026
8	Sulawesi Utara	0.47571	0.47819	0.48784	0.48760	0.49505
9	Sulawesi Tengah	0.31061	0.35795	0.33441	0.47413	0.50634
10	Sulawesi Selatan	0.67847	0.68485	0.67840	0.67776	0.66499
11	Sulawesi Tenggara	0.95025	0.70133	0.65924	0.66005	0.54710
12	Gorontalo	0.16566	0.16233	0.15783	0.15380	0.15145
13	Sulawesi Barat	0.69106	0.43595	0.47278	0.47730	0.46531
14	Maluku	0.40196	0.40885	0.42545	0.44721	0.45243
15	Maluku Utara	0.36136	0.27609	0.26615	0.27177	0.28108
16	Papua Barat	0.27300	0.27400	0.89800	0.89400	0.89170
17	Papua	0.79900	0.82300	0.79300	0.78900	0.82320

Lampiran 4.4 Indeks Theil Kawasan Timur Indonesia

No.	Wilayah	Theil intra provinsi					Theil antarprovinsi				
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	Kalimantan Barat	0.00191	0.00199	0.00195	0.00194	0.00195	-0.02350	-0.02328	0.00627	-0.02315	-0.02288
2	Kalimantan Tengah	0.00114	0.00112	0.00331	0.00100	0.00096	-0.00354	-0.00314	0.00223	-0.00232	-0.00191
3	Kalimantan Selatan	0.00818	0.00806	0.00789	0.00739	0.00703	-0.01079	-0.01102	0.00520	-0.01173	-0.01193
4	Kalimantan Timur	0.05620	0.04573	0.04113	0.03779	0.03431	0.45899	0.41569	0.01856	0.35254	0.32156
5	Kalimantan Utara	0.00000	0.00053	0.00048	0.00040	0.00032	0.00000	0.02482	0.00037	0.02443	0.02332
6	Nusa Tenggara Barat	0.00909	0.00871	0.00792	0.02104	0.02144	-0.03395	-0.03384	0.00435	-0.03101	-0.03059
7	Nusa Tenggara Timur	0.00558	0.00451	0.00459	0.00466	0.00474	-0.03686	-0.03684	0.00338	-0.03685	-0.03687
8	Sulawesi Utara	0.00283	0.00287	0.00305	0.00307	0.00319	-0.00719	-0.00672	0.00197	-0.00539	-0.00465
9	Sulawesi Tengah	0.00188	0.00254	0.00225	0.00455	0.00552	-0.01196	-0.01076	0.00252	-0.00704	-0.00485
10	Sulawesi Selatan	0.01918	0.01986	0.02004	0.02034	0.02042	-0.02834	-0.02538	0.02450	-0.01801	-0.01374
11	Sulawesi Tenggara	0.00980	0.00531	0.00770	0.00779	0.00599	-0.00677	-0.00634	0.00208	-0.00558	-0.00513
12	Gorontalo	0.00017	0.00016	0.00016	0.00015	0.00015	-0.00730	-0.00719	0.00029	-0.00697	-0.00686
13	Sulawesi Barat	-0.00106	0.00129	0.00156	0.00161	0.00156	-0.00800	-0.00795	0.00038	-0.00760	-0.00755
14	Maluku	0.00095	0.00094	0.00101	0.00108	0.00109	-0.01196	-0.01198	0.00049	-0.01195	-0.01194
15	Maluku Utara	0.00095	0.00044	0.00039	0.00039	0.00044	-0.00765	-0.00767	0.00027	-0.00770	-0.00771
16	Papua Barat	0.01954	0.01958	0.01875	0.01794	0.01735	0.01849	0.01902	0.00053	0.01832	0.01795
17	Papua	0.05687	0.05881	0.05521	0.05619	0.06111	0.01398	0.01626	0.00466	0.01699	0.02090
Theil-intra provinsi		0.19320	0.18244	0.17740	0.18733	0.18757					
Theil-antarprovinsi		0.29365	0.28368	0.07804	0.23698	0.21712					
Total Ketimpangan KTI		0.48685	0.46612	0.25544	0.42431	0.40468					
Theil-intra provinsi (%)		39.68	39.14	69.45	44.15	46.35					
Theil-antarprovinsi (%)		60.32	60.86	30.55	55.85	53.65					
Total Ketimpangan KTI (%)		100	100	100	100	100					

Lampiran 4.5 Data Penelitian Kawasan Barat Indonesia

Obs.	LNKW	LNTK	LNPM	LNTIK	LNAGLO
_Aceh-2012	-2.569485	4.509760	28.177025	1.269761	-1.036339
_Aceh-2013	-2.643274	4.496471	29.196424	1.353255	-1.113158
_Aceh-2014	-2.760218	4.510640	29.335257	1.366092	-1.209850
_Aceh-2015	-3.008838	4.500587	29.131727	1.420696	-1.429227
_Aceh-2016	-2.899550	4.526452	29.081051	1.226712	-1.514878
_Sumut-2012	-2.568362	4.541165	29.804676	1.506297	-0.160460
_Sumut-2013	-2.575510	4.537641	30.396499	1.413423	-0.174115
_Sumut-2014	-2.590027	4.540845	30.035788	1.408545	-0.196973
_Sumut-2015	-2.581545	4.535713	30.698020	1.456287	-0.208127
_Sumut-2016	-2.564885	4.544995	30.548668	1.305626	-0.208760
_Sumbar-2012	-3.587443	4.537748	28.107597	1.368639	-0.733988
_Sumbar-2013	-3.585132	4.532707	28.214283	1.490654	-0.745298
_Sumbar-2014	-3.581641	4.537961	28.227450	1.481605	-0.752976
_Sumbar-2015	-3.567405	4.533782	28.481255	1.545433	-0.785541
_Sumbar-2016	-3.549605	4.552929	29.212281	1.444563	-0.783089
_Riau-2012	-1.739564	4.561218	30.440360	1.327075	0.058219
_Riau-2013	-1.875880	4.548600	30.664999	1.479329	0.098853
_Riau-2014	-2.013362	4.537320	30.839611	1.501853	0.125473
_Riau-2015	-2.108953	4.523635	30.573176	1.536867	0.161781
_Riau-2016	-2.219412	4.527965	30.537426	1.449269	0.190718
_Jambi-2012	-2.113205	4.572440	28.715237	1.305626	-0.737293
_Jambi-2013	-2.147506	4.555560	28.799683	1.442202	-0.726965
_Jambi-2014	-2.178520	4.553034	28.067608	1.439835	-0.752500
_Jambi-2015	-2.223432	4.560800	29.245630	1.504077	-0.767700
_Jambi-2016	-2.280403	4.564348	29.179433	1.366092	-0.781895
_Sumsel-2012	-2.214693	4.546481	29.985733	1.427916	-0.255467
_Sumsel-2013	-2.229669	4.553877	29.863037	1.393766	-0.269160
_Sumsel-2014	-1.940375	4.554298	30.635994	1.427916	-0.272758
_Sumsel-2015	-1.949712	4.542550	30.619372	1.451614	-0.260420
_Sumsel-2016	-1.961189	4.561114	31.461130	1.335001	-0.243096
_Bengkulu-2012	-2.857276	4.568402	26.571345	1.311032	-1.362808
_Bengkulu-2013	-2.862846	4.556610	26.667153	1.449269	-1.352113
_Bengkulu-2014	-2.878750	4.569854	26.236259	1.477049	-1.345014
_Bengkulu-2015	-2.876564	4.554824	27.454376	1.547563	-1.346212
_Bengkulu-2016	-2.870352	4.571613	28.160169	1.368639	-1.336092

Lanjutan Lampiran 4.5

Obs.	LNKW	LNTK	LNPM	LNTIK	LNAGLO
_Lampung-2012	-4.066165	4.551980	27.974243	1.208960	-0.323805
_Lampung-2013	-4.069028	4.544889	28.270633	1.286474	-0.307414
_Lampung-2014	-4.065058	4.556085	29.325271	1.300192	-0.314331
_Lampung-2015	-4.060233	4.552402	29.169451	1.324419	-0.289349
_Lampung-2016	-4.039402	4.557869	29.602775	1.199965	-0.295397
_Babel-2012	-4.105729	4.569647	27.731738	1.300192	0.017512
_Babel-2013	-4.089894	4.567468	28.313230	1.408545	-0.001331
_Babel-2014	-4.075071	4.552402	28.284231	1.418277	-0.035947
_Babel-2015	-4.036510	4.540205	28.403232	1.506297	-0.060412
_Babel-2016	-4.018940	4.578826	28.699201	1.386294	-0.069363
_Kepri-2012	-1.809286	4.549975	29.286819	1.615420	0.468817
_Kepri-2013	-1.787823	4.540632	29.081643	1.865629	0.475719
_Kepri-2014	-1.790762	4.535927	29.221526	1.840550	0.468131
_Kepri-2015	-1.790774	4.541165	29.876657	1.870263	0.467317
_Kepri-2016	-1.801016	4.525152	29.641532	1.720979	0.457203
_JKT-2012	-0.951680	4.501253	31.507656	2.202765	-0.607298
_JKT-2013	-0.947039	4.510640	31.251017	2.172476	-0.616231
_JKT-2014	-0.935522	4.516667	31.933848	2.222459	-0.621925
_JKT-2015	-0.916666	4.530123	31.812190	2.224624	-0.626700
_JKT-2016	-0.903720	4.542017	31.689309	2.002830	-0.641814
_Jabar-2012	-2.006868	4.509980	31.584214	1.460938	0.589952
_Jabar-2013	-1.994512	4.508439	32.193821	1.534714	0.595894
_Jabar-2014	-2.004379	4.516885	32.239767	1.572774	0.595221
_Jabar-2015	-2.026447	4.513932	32.289147	1.615420	0.591944
_Jabar-2016	-2.042840	4.512068	32.274134	1.506297	0.589302
_Jateng-2012	-1.936727	4.547223	29.726878	1.381282	0.374483
_Jateng-2013	-1.963637	4.543082	30.535348	1.420696	0.375672
_Jateng-2014	-1.972864	4.546693	30.594555	1.427916	0.386831
_Jateng-2015	-1.981531	4.553982	30.932102	1.483875	0.383478
_Jateng-2016	-2.009610	4.557764	31.266506	1.406097	0.378092
_DIY-2012	-2.285197	4.564661	27.775107	1.627278	-0.601874
_DIY-2013	-2.281607	4.571200	27.191887	1.826161	-0.590787
_DIY-2014	-2.273483	4.571303	28.043962	1.800058	-0.605127
_DIY-2015	-2.269615	4.563619	28.095720	1.864080	-0.629423
_DIY-2016	-2.269092	4.577593	27.823248	1.811562	-0.623293

Lanjutan Lampiran 4.5

Obs.	LNKW	LNTK	LNPM	LNTIK	LNAGLO
_Jatim-2012	-1.249438	4.563097	31.409506	1.388791	0.190055
_Jatim-2013	-1.241813	4.560905	31.964991	1.465568	0.185855
_Jatim-2014	-1.222422	4.562367	31.734575	1.479329	0.201341
_Jatim-2015	-1.208858	4.559440	31.897437	1.556037	0.206045
_Jatim-2016	-1.199290	4.562158	31.913378	1.451614	0.202176
_Banten-2012	-1.658345	4.498364	31.077323	1.497388	0.466145
_Banten-2013	-1.656996	4.500920	31.530044	1.589235	0.474715
_Banten-2014	-1.676770	4.510090	31.139329	1.637053	0.436400
_Banten-2015	-1.693080	4.504797	31.454798	1.677097	0.420584
_Banten-2016	-1.704953	4.511738	31.573637	1.572774	0.405303
_Bali-2012	-3.498226	4.584559	29.681155	1.541159	-1.305072
_Bali-2013	-3.537120	4.587108	29.678634	1.704748	-1.289480
_Bali-2014	-3.552462	4.585987	29.347684	1.720979	-1.271003
_Bali-2015	-3.568894	4.591274	29.721645	1.793425	-1.257760
_Bali-2016	-3.597358	4.586089	29.508432	1.728109	-1.280249

Lampiran 4.6 Data Penelitian Kawasan Timur Indonesia

Obs	LNKW	LNTK	LNPM	LNTIK	LNAGLO
_Kalbar-2012	-1.324289	4.569750	29.526363	1.205971	-0.350832
_Kalbar-2013	-1.303241	4.564036	29.977140	1.311032	-0.349372
_Kalbar-2014	-1.315508	4.563931	30.424581	1.348073	-0.358404
_Kalbar-2015	-1.316205	4.552297	30.832526	1.406097	-0.368836
_Kalbar-2016	-1.313788	4.561949	30.492627	1.275363	-0.370218
_Kalteng-2012	-1.510186	4.572957	29.893143	1.294727	-0.513932
_Kalteng-2013	-1.525510	4.573783	29.672958	1.430311	-0.512222
_Kalteng-2014	-1.130645	4.572234	30.181313	1.442202	-0.457907
_Kalteng-2015	-1.589400	4.558707	30.280673	1.519513	-0.459813
_Kalteng-2016	-1.617798	4.555770	30.245762	1.415853	-0.443436
_Kalsel-2012	-0.718424	4.551242	29.446325	1.686399	-0.608451
_Kalsel-2013	-0.723429	4.566533	30.071249	1.521699	-0.626358
_Kalsel-2014	-0.732812	4.566429	29.813425	1.515127	-0.640056
_Kalsel-2015	-0.757891	4.554719	30.360190	1.576915	-0.640443
_Kalsel-2016	-0.780434	4.549129	29.883779	1.483875	-0.615177
_Kaltim-2012	-0.550700	4.511958	30.864417	1.574846	-0.206706
_Kaltim-2013	-0.593387	4.521354	31.106453	1.728109	-0.202688
_Kaltim-2014	-0.632797	4.528505	31.308625	1.752672	-0.216606
_Kaltim-2015	-0.650931	4.527209	31.379647	1.840550	-0.175330
_Kaltim-2016	-0.674064	4.522332	30.730968	1.764731	-0.112440

Lanjutan Lampiran 4.6

Obs	LNKW	LNTK	LNPM	LNTIK	LNAGLO
_Kaltara-2012	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
_Kaltara-2013	-1.365665	0.000000	27.089522	0.000000	-0.921195
_Kaltara-2014	-1.434808	0.000000	28.319182	0.000000	-0.947325
_Kaltara-2015	-1.522311	4.546693	29.043730	1.763017	-0.918240
_Kaltara-2016	-1.628626	4.551453	29.336897	1.599388	-0.888199
_NTB-2012	-0.387088	4.551136	29.454535	1.128171	-1.540532
_NTB-2013	-0.406095	4.549869	29.625540	1.211941	-1.557102
_NTB-2014	-0.457727	4.545951	26.715590	1.261298	-1.575863
_NTB-2015	-0.071553	4.546587	27.902628	1.300192	-1.739205
_NTB-2016	-0.067245	4.564973	28.384687	1.190888	-1.738016
_NTT-2012	-0.403817	4.575844	25.313617	1.040277	-2.937086
_NTT-2013	-0.462896	4.573060	25.652482	1.134623	-2.944374
_NTT-2014	-0.451937	4.572027	29.556624	1.163151	-2.961988
_NTT-2015	-0.440515	4.566117	30.023805	1.181727	-2.957223
_NTT-2016	-0.430377	4.572130	29.536199	1.011601	-2.953190
_Sulut-2012	-0.742938	4.524069	27.753318	1.401183	-0.764630
_Sulut-2013	-0.737753	4.536034	27.489017	1.536867	-0.778010
_Sulut-2014	-0.717774	4.526776	27.898829	1.547563	-0.807055
_Sulut-2015	-0.718260	4.510530	28.026140	1.617406	-0.837011
_Sulut-2016	-0.703099	2.238580	29.954673	1.534714	-0.879918
_Sulteng-2012	-1.169220	4.565077	29.759450	1.211941	-1.373047
_Sulteng-2013	-1.027356	4.561532	30.031358	1.335001	-1.423228
_Sulteng-2014	-1.095382	4.567676	30.558670	1.329724	-1.397012
_Sulteng-2015	-0.746282	4.563306	30.399773	1.381282	-0.896633
_Sulteng-2016	-0.680553	4.571717	30.748211	1.255616	-0.684866
_Sulsel-2012	-0.387922	4.544677	29.704525	1.427916	-0.552056
_Sulsel-2013	-0.378553	4.552824	29.512327	1.396245	-0.539338
_Sulsel-2014	-0.388012	4.553034	29.764477	1.427916	-0.527321
_Sulsel-2015	-0.388962	4.543827	30.151430	1.510722	-0.527865
_Sulsel-2016	-0.407985	4.555980	29.752026	1.449269	-0.515011
_Sultra-2012	-0.051030	4.563931	27.856178	1.249902	-1.364478
_Sultra-2013	-0.354778	4.559545	28.470314	1.311032	-1.397537
_Sultra-2014	-0.416668	4.559859	28.813574	1.355835	-1.385183
_Sultra-2015	-0.415441	4.548071	29.021227	1.396245	-1.374338
_Sultra-2016	-0.603127	4.577593	29.554902	1.363537	-1.346151
_Gorontalo-2012	-1.797812	4.560591	26.950298	1.244155	-1.768516
_Gorontalo-2013	-1.818112	4.563097	26.708856	1.316408	-1.767672
_Gorontalo-2014	-1.846218	4.562471	25.288697	1.321756	-1.781033
_Gorontalo-2015	-1.872102	4.557554	25.967578	1.337629	-1.792916
_Gorontalo-2016	-1.887526	4.577182	28.495234	1.313724	-1.786408

Lanjutan Lampiran 4.6

Obs	LNKW	LNTK	LNPM	LNTIK	LNAGLO
_Sulbar-2012	-0.369534	4.583538	26.163664	1.098612	-1.000129
_Sulbar-2013	-0.830237	4.581594	27.296349	1.278152	-1.000730
_Sulbar-2014	-0.749115	4.584151	27.517709	1.321756	-0.781922
_Sulbar-2015	-0.739602	4.571096	27.754468	1.202972	-0.744613
_Sulbar-2016	-0.765045	4.571303	26.611816	1.105257	-0.831215
_Maluku-2012	-0.911410	4.527101	25.172893	1.252763	-1.504015
_Maluku-2013	-0.894412	4.502584	27.190311	1.329724	-1.500826
_Maluku-2014	-0.854610	4.494127	25.816795	1.332366	-1.485699
_Maluku-2015	-0.804731	4.500587	27.759157	1.408545	-1.497780
_Maluku-2016	-0.793122	4.532062	27.960277	1.342865	-1.479832
_Malut-2012	-1.017875	4.556400	27.808080	1.147402	-1.521056
_Malut-2013	-1.287010	4.565805	29.109814	1.208960	-1.521990
_Malut-2014	-1.323680	4.550820	27.956091	1.266948	-1.479753
_Malut-2015	-1.302795	4.542763	28.681710	1.321756	-1.497731
_Malut-2016	-1.269116	4.564244	29.406966	1.166271	-1.406905
_Papuabarat-2012	-0.012376	4.548706	26.596059	1.300192	0.306545
_Papuabarat-2013	-0.028399	4.557869	27.595025	1.388791	0.314740
_Papuabarat-2014	-0.068386	4.553666	28.328308	1.401183	0.299510
_Papuabarat-2015	-0.092444	4.520919	28.920471	1.463255	0.282771
_Papuabarat-2016	-0.114626	4.527641	29.565931	1.316408	0.276774
_Papua-2012	-0.042146	4.568195	30.089062	1.278152	-2.443296
_Papua-2013	-0.042295	4.572337	31.010325	0.996949	-2.506367
_Papua-2014	-0.042013	4.570165	30.399336	1.022451	-2.460081
_Papua-2015	-0.042046	4.564452	30.244710	1.068153	-2.492221
_Papua-2016	-0.042192	4.571096	30.398542	0.879627	-2.530239

Lampiran 4.7 Hasil Uji *Likelihood* Kawasan Barat Indonesia

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	419.382085	(16,64)	0.0000
Cross-section Chi-square	396.268358	16	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: LNKW
Method: Panel Least Squares
Date: 04/26/18 Time: 16:37
Sample: 2012 2016
Periods included: 5
Cross-sections included: 17
Total panel (balanced) observations: 85

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.381891	15.44883	-0.024720	0.9803
LNTK	-2.717260	3.258492	-0.833901	0.4068
LNPM	0.273730	0.062282	4.395018	0.0000
LNTIK	1.425795	0.324078	4.399538	0.0000
LNAGLO	0.161569	0.141512	1.141735	0.2570
R-squared	0.530400	Mean dependent var		-2.447286
Adjusted R-squared	0.506919	S.D. dependent var		0.905249
S.E. of regression	0.635663	Akaike info criterion		1.988726
Sum squared resid	32.32540	Schwarz criterion		2.132412
Log likelihood	-79.52086	Hannan-Quinn criter.		2.046520
F-statistic	22.58939	Durbin-Watson stat		0.119982
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 4.8 Hasil Uji Hausman Kawasan Barat Indonesia

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	12.089640	4	0.0167

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
LNTK	2.590459	2.458464	0.030567	0.4503
LNPM	0.012171	0.018498	0.000017	0.1274
LNTIK	-0.083926	-0.053141	0.000370	0.1094
LNAGLO	0.624875	0.618373	0.006673	0.9365

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: LNKW

Method: Panel Least Squares

Date: 04/26/18 Time: 16:37

Sample: 2012 2016

Periods included: 5

Cross-sections included: 17

Total panel (balanced) observations: 85

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-14.26267	4.967948	-2.870937	0.0055
LNTK	2.590459	1.098524	2.358126	0.0214
LNPM	0.012171	0.019949	0.610110	0.5439
LNTIK	-0.083926	0.123463	-0.679764	0.4991
LNAGLO	0.624875	0.161579	3.867302	0.0003

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.995563	Mean dependent var	-2.447286
Adjusted R-squared	0.994177	S.D. dependent var	0.905249
S.E. of regression	0.069079	Akaike info criterion	-2.296784
Sum squared resid	0.305402	Schwarz criterion	-1.693305
Log likelihood	118.6133	Hannan-Quinn criter.	-2.054048
F-statistic	718.0634	Durbin-Watson stat	0.961451
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 4.9 Hasil Analisis Regresi Model Terpilih Kawasan Barat Indonesia

Dependent Variable: LNKW
 Method: Panel Least Squares
 Date: 04/26/18 Time: 16:38
 Sample: 2012 2016
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 17
 Total panel (balanced) observations: 85

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-14.26267	4.967948	-2.870937	0.0055
LNTK	2.590459	1.098524	2.358126	0.0214
LNPM	0.012171	0.019949	0.610110	0.5439
LNTIK	-0.083926	0.123463	-0.679764	0.4991
LNAGLO	0.624875	0.161579	3.867302	0.0003

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.995563	Mean dependent var	-2.447286
Adjusted R-squared	0.994177	S.D. dependent var	0.905249
S.E. of regression	0.069079	Akaike info criterion	-2.296784
Sum squared resid	0.305402	Schwarz criterion	-1.693305
Log likelihood	118.6133	Hannan-Quinn criter.	-2.054048
F-statistic	718.0634	Durbin-Watson stat	0.961451
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 4.10 Hasil Uji *Likelihood* Kawasan Timur Indonesia

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	101.368462	(16,64)	0.0000
Cross-section Chi-square	278.049366	16	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: LNKW
Method: Panel Least Squares
Date: 04/26/18 Time: 12:24
Sample: 2012 2016
Periods included: 5
Cross-sections included: 17
Total panel (balanced) observations: 85

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.448766	0.480254	-0.934436	0.3529
LNTK	0.166820	0.117557	1.419046	0.1598
LNPM	-0.020059	0.019965	-1.004724	0.3181
LNTIK	-0.352903	0.351346	-1.004432	0.3182
LNAGLO	0.023119	0.087251	0.264973	0.7917
R-squared	0.037321	Mean dependent var		-0.777461
Adjusted R-squared	-0.010813	S.D. dependent var		0.525530
S.E. of regression	0.528363	Akaike info criterion		1.618957
Sum squared resid	22.33342	Schwarz criterion		1.762642
Log likelihood	-63.80567	Hannan-Quinn criter.		1.676751
F-statistic	0.775353	Durbin-Watson stat		0.110151
Prob(F-statistic)	0.544448			

Lampiran 4.11 Hasil Uji Hausman Kawasan Timur Indonesia

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	6.147909	4	0.1884

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
LNTK	-0.027971	-0.017263	0.000040	0.0903
LNPM	-0.036349	-0.040482	0.000007	0.1129
LNTIK	-0.028955	-0.051109	0.000263	0.1722
LNAGLO	0.351714	0.199226	0.007756	0.0834

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: LNKW

Method: Panel Least Squares

Date: 04/26/18 Time: 12:24

Sample: 2012 2016

Periods included: 5

Cross-sections included: 17

Total panel (balanced) observations: 85

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.805927	0.142732	5.646447	0.0000
LNTK	-0.027971	0.043517	-0.642767	0.5227
LNPM	-0.036349	0.006333	-5.739767	0.0000
LNTIK	-0.028955	0.123349	-0.234739	0.8152
LNAGLO	0.351714	0.138612	2.537399	0.0136

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.963455	Mean dependent var	-0.777461
Adjusted R-squared	0.952034	S.D. dependent var	0.525530
S.E. of regression	0.115097	Akaike info criterion	-1.275741
Sum squared resid	0.847822	Schwarz criterion	-0.672263
Log likelihood	75.21901	Hannan-Quinn criter.	-1.033005
F-statistic	84.36268	Durbin-Watson stat	1.655723
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 4.12 Hasil Analisis Regresi Model Terpilih Kawasan Timur Indonesia

Dependent Variable: LNKW
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 04/26/18 Time: 12:24
 Sample: 2012 2016
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 17
 Total panel (balanced) observations: 85
 Swamy and Arora estimator of component variances
 Cross-section SUR (PCSE) standard errors & covariance (d.f. corrected)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.738636	0.125939	5.865027	0.0000
LNTK	-0.017263	0.022061	-0.782521	0.4362
LNPM	-0.040482	0.004451	-9.094134	0.0000
LNTIK	-0.051109	0.067702	-0.754911	0.4525
LNAGLO	0.199226	0.090868	2.192479	0.0313

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.555920	0.9589
Idiosyncratic random		0.115097	0.0411

Weighted Statistics			
R-squared	0.621391	Mean dependent var	-0.071679
Adjusted R-squared	0.602461	S.D. dependent var	0.184980
S.E. of regression	0.116631	Sum squared resid	1.088231
F-statistic	32.82494	Durbin-Watson stat	1.325954
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	-0.169872	Mean dependent var	-0.777461
Sum squared resid	27.14012	Durbin-Watson stat	0.053166